



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2019 - 2028**

CIBODAS, 2018



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 Sdl. CIPANAS-CIANJUR 43253 Tlp/fax (0263) 512776
E mail: info@gedepangrango.org; Website: www.gedepangrango.org
CIPANAS _ CIANJUR 43253

RENCANAN PENGELOLAAN JANGKA PANJANG
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2019 - 2028



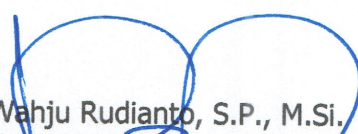
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Cibodas, 31 Desember 2018

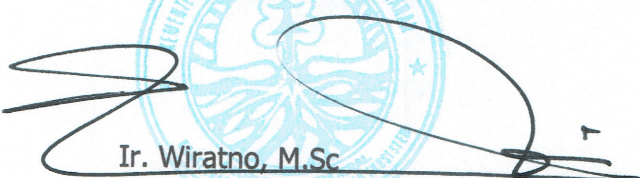
**RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2019 - 2028**

Disusun di : Cibodas
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

Oleh :
Kepala Balai Basar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango


Wahju Rudianto, S.P., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

Disahkan
Pada Tanggal : **09 MAY 2019**
Oleh
Direktur Jenderal KSDAE


Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Dinilai
Pada Tanggal : **10 APR 2019**
Oleh
Direktur Kawasan Konservasi


Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.
NIP. 196908021998032001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. 2516061 (Hunting 6 line) Fax. 2510731
website : <http://www.bappeda.jabarprov.go.id>
email : public@bappeda.jabarprov.go.id

Bandung, 1 Februari 2019

Nomor	: 800/384 / FSK	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Kepala Balai Besar
Lampiran	: -	Taman Nasional
Hal	: Rekomendasi terhadap RPTN	Gunung Gede Pangrango
	Gunung Gede Pangrango	
		di
		Cianjur

Menindaklanjuti Surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Nomor S.04/BBTNGGP/BIDTEK/Tek.P3/01/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Perihal Rekomendasi Bappeda Provinsi Jawa Barat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan pelestarian alam taman nasional (Pasal 32). Adapun di dalam Revisi Perda RTRWP Jawa Barat yang saat ini sedang disusun, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
2. Di dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Gede Pangrango terdapat penambahan luas kawasan TNGGP dari 15.196 Ha menjadi 24,270,80 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNGGP di Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bogor Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan hal ini, Revisi Perda RTRWP Jawa Barat yang saat ini sedang disusun telah mengakomodasi penetapan kawasan hutan terbaru berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017. Dengan demikian penambahan luas kawasan TNGGP telah terakomodasi dalam Revisi RTRWP Jawa Barat.
3. Berdasarkan rencana pola ruang dalam Perda No. 22/2010 tentang RTRWP Jawa Barat 2009-2029, kawasan Gunung Gede Pangrango ditetapkan sebagai hutan konservasi. Rencana pola ruang untuk kawasan Gunung Gede Pangrango dan daerah sekitarnya (di luar kawasan TNGGP) juga meliputi kawasan resapan air, kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan *enclave*, kawasan permukiman perkotaan, kawasan pertanian pangan, kawasan permukiman pedesaan, dan kawasan sekitar mata air.
4. Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Gede Pangrango Tahun 2019-2028 yang merupakan kesatuan dari Cagar Alam Cibodas, Cagar Alam Cimungkad, Taman Wisata Situgunung dan Hutan Lindung

Lereng Gunung Gede Pangrango, agar memperhatikan arahan zonasi yang ditetapkan dalam Perda No. 22/2010 tentang RTRWP Jawa Barat 2009-2029 sebagai berikut:

- 1) Arahan zonasi untuk kawasan taman nasional (Pasal 77):
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Arahan zonasi untuk kawasan hutan lindung (Pasal 68):
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
 - 3) Arahan zonasi untuk kawasan cagar alam (Pasal 74):
 - a. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf a;
 - c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf c; dan
 - e. Ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan.
 - 4) Arahan zonasi untuk kawasan taman wisata alam (Pasal 79):
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf a;
 - c. Pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf c.
 - 5) Arahan zonasi untuk kawasan Gunung Gede Pangrango dan daerah sekitarnya (di luar kawasan TNGGP) meliputi kawasan resapan air (Pasal 69), kawasan rawan bencana alam geologi (Pasal 85), kawasan rawan bencana gunung api (Pasal 86), kawasan sekitar mata air (Pasal 72), kawasan hutan produksi (Pasal 92), kawasan pertanian pangan (Pasal 93), dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan (Pasal 102).
5. Mengacu pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun

2015-2025, TNGGP ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), yaitu Kawasan Ekowisata dan Budaya Gunung Halimun-Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya (Pasal 27). Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah sesuai dengan Rencana Pembangunan KPPP tersebut, yaitu dikembangkan dengan tema pengembangan adalah ekowisata (Pasal 28). Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, dan Daerah Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai daya tarik wisata primer. Selain itu, desa wisata di sekitar taman nasional di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, serta Situs Batu Kujang dan Batu Gores di Daerah Kabupaten Sukabumi, ditetapkan sebagai daya tarik wisata sekunder.

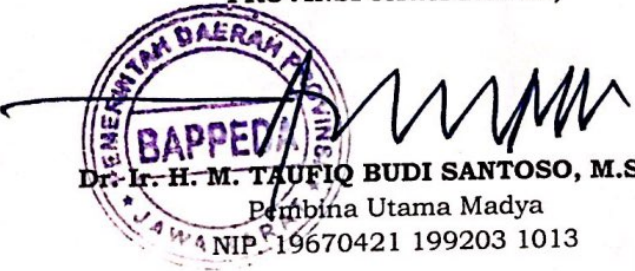
6. Arahan zonasi untuk kawasan pariwisata yang ditetapkan dalam Perda No. 22/2010 tentang RTRWP Jawa Barat 2009-2029 (Pasal 101), adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan budaya masyarakat;
 - b. Pengendalian pemanfaatan potensi alam;
 - c. Penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - d. Pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
 - e. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
 - f. Ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco-architecture*.
7. Sesuai dengan misi dalam RPTN TNGGP, yaitu mempertahankan ekosistem, mengembangkan pendidikan konservasi, mengembangkan ekowisata berkelanjutan, menciptakan destinasi pendakian yang berkelanjutan, dan membangun data dan informasi keanekaragaman hayati, perlu adanya pembatasan kunjungan wisatawan untuk pendakian agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Rencana pengembangan wisata alam di TNGGP perlu segera dilengkapi dengan *masterplan*, *siteplan*, DED dan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan agar jenis, skala dan dampak aktivitas wisata dapat dipastikan mendukung terwujudnya ekowisata berkelanjutan di TNGGP.
8. Kawasan TNGGP berada pada kawasan rawan letusan gunung api dan kawasan rawan gerakan tanah, untuk itu pada dokumen RPTN TNGGP perlu ditambahkan dengan rencana mitigasi bencana.
9. Kawasan TNGGP merupakan bagian penting dari hulu 4 DAS besar, yaitu DAS Cimandiri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung dan DAS Citarum yang saat ini berstatus kritis dan tercemar berat. Rencana Pengelolaan TNGGP diharapkan dapat terintegrasi dengan Rencana Pengelolaan DAS yang telah disusun oleh Badan Pengelola DAS - KLHK. Khusus untuk DAS Citarum,

berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana Aksi Citarum Harum dan membentuk Satuan Tugas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Rencana Pengelolaan TNGGP diharapkan dapat terintegrasi dan mendukung rencana aksi tersebut.

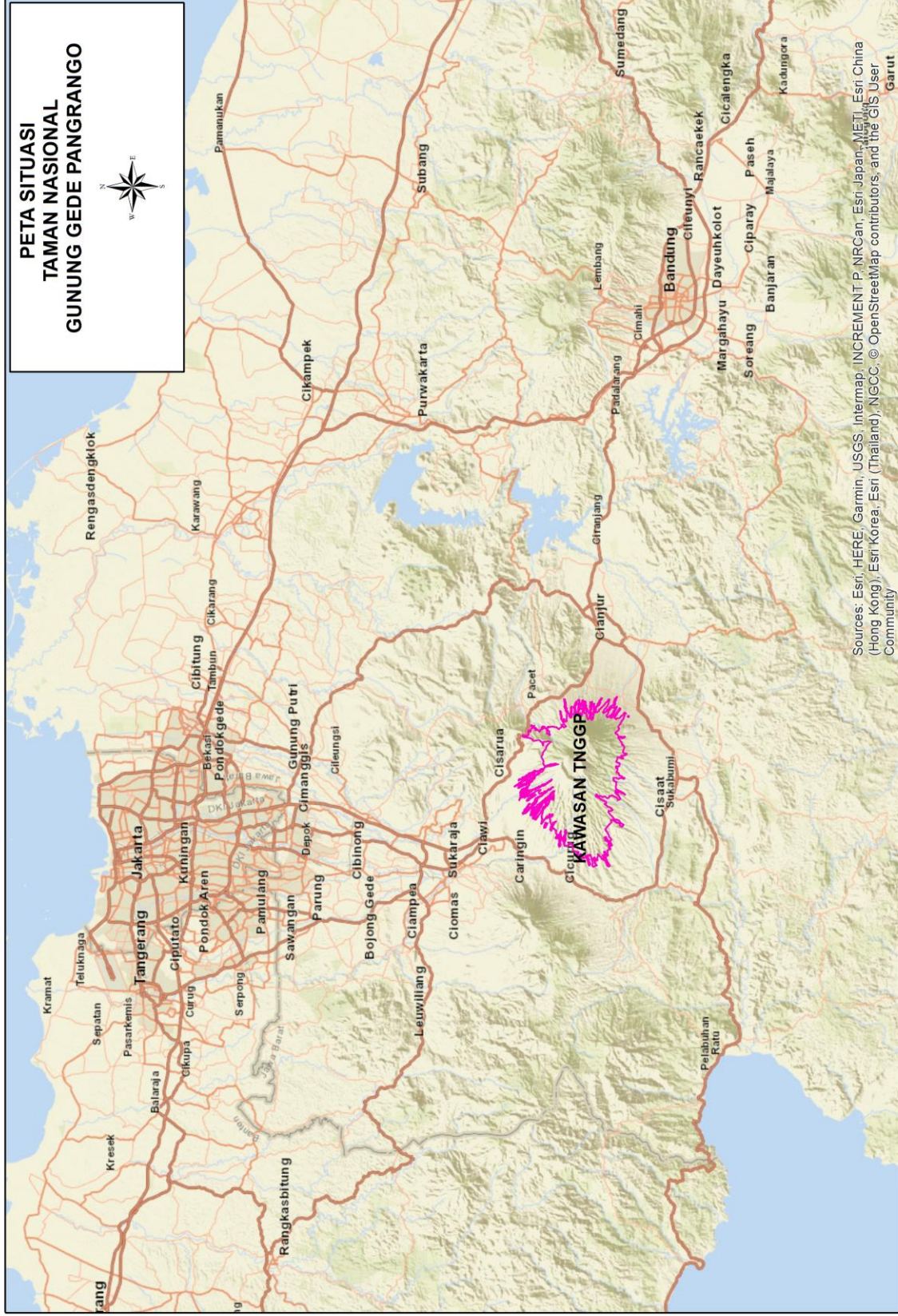
10. Balai Besar TNGGP diharapkan dapat memperluas pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan yang telah berhasil dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan beberapa perusahaan pemanfaat air di luar kawasan TNGGP dalam upaya pemulihan ekosistem TNGGP serta pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, mengacu pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015, bahwa pelaksanaan kerjasama harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 15), Balai Besar TNGGP agar dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat terkait.
11. Untuk mendukung tercapainya misi pengelolaan TNGGP yang berkelanjutan dan terjaganya fungsi kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat, berbagai permasalahan yang terjadi di TNGGP, diantaranya jalur ilegal pendakian dan kunjungan wisatawan di zona inti, perburuan tanaman dan satwa liar di zona rimba dan zona pemanfaatan, perkembangan kegiatan wisata alam dan penggarapan kawasan yang tidak terkendali di zona pemanfaatan, zona rehabilitasi dan zona tradisional, serta pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi, transportasi, listrik dan makam yang perlu dibatasi di zona khusus, agar dapat diupayakan penyelesaiannya baik melalui pembinaan dan pelibatan masyarakat secara partisipatif maupun upaya penegakan hukum.

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,**


Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19670421 199203 1013

**PETA SITUASI
TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO**



Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ditetapkannya kawasan hutan Gunung Gede dan Pangrango sebagai kawasan taman nasional didasarkan bahwa hutan Gunung Gede dan Pangrango merupakan lanskap asli hutan hujan tropis pegunungan yang utuh, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta merupakan habitat penting bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi seperti macan tutul, surili, owa jawa dan, berbagai jenis burung. Sehingga mandat penetapan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah keterwakilan hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa dan sebagai habitat macan tutul, surili, owa jawa dan, berbagai jenis burung.

Kondisi nilai penting TNGGP saat ini relative masih bagus, baik tutupan hutan maupun keanekaragaman hayatinya. Hal ini dapat dilihat bahwa luas TNGGP seluas 24.270,80 ha, hanya sekitar 903 ha yang merupakan areal terbuka yang terdiri dari pertanian lahan kering campur semak $\pm$ 11 ha (hasil analisa citra satelit dan ground check 2017). Namun demikian, sebagian besar areal perluasan TNGGP yang didominasi tanaman monokultur berupa pinus dan damar perlu dilakukan upaya pemulihan ekosistem untuk menyesuaikan dengan mandat TNGGP sebagai keterwakilan hutan hujan tropis pegunungan.

Kondisi keanekaragaman habitat yang nyaman bagi satwa liar karena masih ditemukan anakan satwa liar di alam yang menunjukkan satwa liar tersebut dapat berkembang biak dengan baik di habitat alaminya.

Namun demikian, dalam pengelolaan TNGGP terdapat isu strategis yang dihadapi yaitu TNGGP sebagai pusat pendakian / wisata alam lainnya. TNGGP sebagai pusat keanekaragaman hayati serta TNGGP merupakan pusat kehidupan masyarakat belum optimal.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan isu strategis yang dihadapi, maka harapan yang ingin dicapai sepuluh tahun ke depan dalam pengelolaan TNGGP adalah:

1. TNGGP sebagai perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa tetap terjaga
2. Populasi owa jawa, macan tutul dan, elang jawa dipertahankan
3. TNGGP bermanfaat secara lestari untuk mendukung pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat

Untuk mencapai harapan yang diinginkan maka visi yang dipilih untuk pengelolaan TNGGP sepuluh tahun ke depan adalah **"SEBAGAI PUSAT KONSERVASI HUTAN HUJAN TROPIS PEGUNUNGAN DI PULAU JAWA YANG BERMANFAAT UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN WILAYAH DAN MASYARAKAT"** dengan misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mempertahankan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam rangka meningkatkan populasi satwa macan tutul, owa jawa, surili, elang jawa dan, keanekaragaman hayati lainnya untuk menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;
2. Mengembangkan pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan untuk seluruh jenjang umur dan ramah disabilitas;
3. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka cagar biosfer Cibodas untuk mendukung pembangunan wilayah dan bagi kehidupan masyarakat.

Sedangkan tujuan pengelolaan untuk mencapai visi dan misi pengelolaan TNGGP adalah:

1. Memulihkan ekosistem yang rusak pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai system penyangga kehidupan
2. Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP
3. Terwujudnya sumberdaya manusia berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP
5. Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan satwa liar lainnya
6. Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati
7. Mewujudkan aktifitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan
8. Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman
9. Meningkatkan pemanfaatan air
10. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Gede Pangrango Tahun 2019 – 2028. RPTN ini merupakan hasil rivieu RPTN yang telah ditetapkan sebelumnya untuk periode 1995 – 2020 mengingat RPTN tersebut masih mengacu ke luas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) seluas 15.196 ha sedangkan saat ini luas TNGGP adalah 24.270,80 ha.

RPTN Gunung Gede Pangrango Tahun 2019 – 2028 menguraikan tentang kondisi TNGGP saat ini, isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan TNGGP baik saat ini maupun yang akan datang. Selain itu, RPTN ini juga menguraikan Visi, Misi, Tujuan Pengelolaan, Strategi dan Rencana Aksi untuk mencapai harapan yang ingin dicapai dalam upaya pengelolaan TNGGP sepuluh tahun ke depan.

Harapan kami, disusunnya RPTN Tahun 2019 – 2028 ini dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dengan memperhatikan keterlibatan para pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan TNGGP.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Kerja yang sudah menyelesaikan penyusunan RPTN ini, semoga pengelolaan TNGGP sepuluh tahun ke depan semakin baik.

Cibodas, Desember 2018

Kepala Balai Besar TNGGP,



Wahju Rudianto, S.P., M.Si.,
NIP. 196910161994031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Rekomendasi	iii
Peta Situasi	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran.....	x
I. Pendahuluan	1
A. Informasi Umum	1
B. Kondisi Saat Ini	10
C. Analisa SWOT	31
D. Kondisi yang Diinginkan	37
II. Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan.....	39
A. Visi	39
B. Misi	39
C. Tujuan Pengelolaan	39
III. Zonasi	41
A. Letak dan Luas Zona.....	41
B. Deskripsi Masing-masing Zona.....	41
IV. Strategi dan Rencana Aksi	52
A. Strategi	52
B. Rencana Aksi	53
V. Pemantauan dan Evaluasi	61

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1. Luas Desa dan Jumlah Penduduk Desa-desa yang Berbatasan Langsung (Desa Penyangga) Kawasan TNGGP per Bidang PTN Wilayah	8
Tabel 2. Kelas Tutupan Lahan TNGGP	11
Tabel 3. Jenis Gangguan Kawasan TNGGP Tahun 2013 - 2017	16
Tabel 4. Data Penerimaan Negar Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2015 - 2018	20
Tabel 5. Data Sampah Hasil Operasi Bersih Gunung dari Tahun 2015 - 2017	23
Tabel 6. Data Penggarap TNGGP 2015-2017	28
Tabel 7. Identifikasi SWOT TNGGP sebagai Pusat Pendakian dan Wisata Alam lainnya ...	32
Tabel 8. Hasil Identifikasi SWOT TNGGP sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati	33
Tabel 9. Hasil Identifikasi SWOT TNGGP sebagai Pusat Kehidupan Masyarakat	34
Tabel 10. Hasil Score Penilaian Bobot	35
Tabel 11. Pemetaan Interaksi Antar Faktor Untuk Strategi Rencana Pengelolaan	37
Tabel 12. Luas Zonasi TNGGP	41
Tabel 13. Matrik Keterkaitan Visi Misi Tujuan Pengelolaan Strategi dan rencana Aksi ...	55
Tabel 14. Indikator Keberhasilan Tujuan Pengelolaan	61
Tabel 15. Indikator Keberhasilan Rencana Aksi	62

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 1. Peta TNGGP (areal penunjukan dan areal perluasan)	2
Gambar 2. Peta Kerja Resort TNGGP.....	7
Gambar 3. Peta Tutupan Lahan TNGGP	11
Gambar 4. Owa Jawa (<i>Hylobates moloch</i>)	13
Gambar 5. Macan Tutul Jawa (<i>Panthera pardus melas</i>)	14
Gambar 6. Elang Jawa (<i>Nisaetus barltelsi</i>).....	15
Gambar 7. Areal Pemanfaatan Air	21
Gambar 8. Peta Penyebaran Alien Species di TNGGP	25
Gambar 9. Pilihan Strategi SWOT Rencana Pengelolaan TNGGP	36
Gambar 10. Zona Inti TNGGP	42
Gambar 11. Zona Rimba TNGGP	44
Gambar 12. Zona Pemanfaatan TNGGP	46
Gambar 13. Zona Rehabilitasi TNGGP	48
Gambar 14. Zona Khusus TNGGP	51

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

- 1 SK Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
- 2 SK Penunjukan
- 3 Berita Acara Konsultasi Publik
- 4 Surat Permohonan dana tau Rekomendasi Bappeda
- 5 Estimasi Kebutuhan Anggaran RPJB TNGGP 2019-2028
- 6 Peta Batas Kawasan Dengan Toponimi
- 7 Peta Nilai Penting Kawasan
- 8 Peta Zonasi / Blok Pengelolaan
- 9 Peta Tutupan Lahan
- 10 Peta Kerawanan Kawasan
- 11 Peta Daerah Penyangga
- 12 Peta Sarana Prasarana
- 13 Peta Daerah Aliran Sungai

BAB I. PENDAHULUAN

A. INFORMASI UMUM

Kawasan

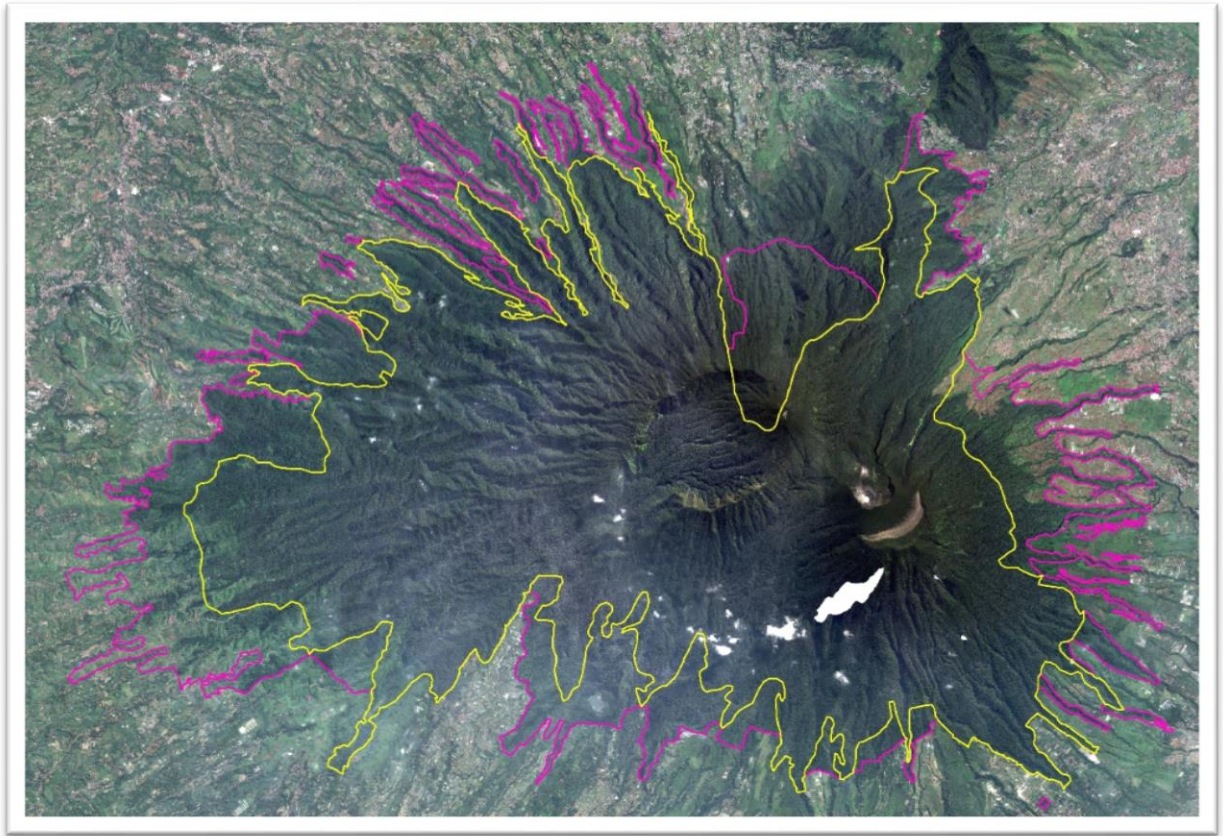
Secara geografis, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terletak antara 106°51' - 107°02' BT dan 6°41' - 6°51' LS dan berdasarkan wilayah administratif pemerintahan berada di tiga wilayah kabupaten yaitu Cianjur, Sukabumi dan Bogor.

TNGGP merupakan salah satu dari 5 (lima) taman nasional pertama di Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 6 Maret 1980 meliputi areal seluas 15.196 Ha. Kawasan ini merupakan kesatuan dari Cagar Alam Cibodas seluas 1.040 Ha, Cagar Alam Cimungkad seluas 56 Ha, Taman Wisata Situgunung seluas 100 Ha dan Hutan Lindung lereng Gunung Gede dan Gunung Pangrango seluas 14.000 Ha yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982. Sebelum ditetapkan sebagai TNGGP, kelompok hutan tersebut ditetapkan sebagai zona inti Cagar Biosfer Cibodas oleh UNESCO pada Tahun 1977.

Pada tahun 2003, kawasan TNGGP mengalami penambahan luas menjadi ± 21.975 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani.

Penyerahan kawasan dilakukan oleh Direktur Utama Perum Perhutani kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 07/SJ/DIR/2009-BA.6/IV-SET/2009 tanggal 29 Januari 2009 dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 002/BAST-HUKAMAS/III/2009-1237/II-TU/2/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten kepada Balai Besar TNGGP seluas 7.655,03 Ha, sehingga total luas TNGGP menjadi 22.851,03 Ha.

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNGGP di Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor Provinsi Jawa Barat, luas kawasan TNGGP ditetapkan 24.270,80 Ha yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta TNGGP (areal penunjukan dan areal perluasan)

Topografi TNGGP bervariasi mulai dari landai hingga bergunung dengan ketinggian berkisar antara 700 mdpl hingga 3.019 mdpl dan kemiringan lereng berkisar antara 20% - 80%. Gunung Gede (2.958 mdpl) dan Gunung Pangrango (3.019 mdpl) merupakan 2 (dua) dari 3 (tiga) gunung berapi di Jawa Barat namun Gunung Pangrango sudah tidak aktif sedangkan Gunung Gede masih aktif.

Dalam kawasan TNGGP tercatat memiliki 58 sungai (Orde I) dan 1.075 anak sungai (Orde I dan Orde II) yang berhulu di dalam kawasan. Sebagian besar sungai (52%) berada di wilayah Kabupaten Sukabumi (menjadi hulu DAS Cimanjuri), sedangkan sisanya 33% terletak di wilayah Kabupaten Bogor (menjadi hulu DAS Cisadane dan Ciliwung) dan 15% di Kabupaten Cianjur (menjadi hulu DAS Citarum). Hal ini

menyebabkan kawasan ini mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan bagi tidak kurang dari 30 juta orang masyarakat sekitar Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok dan Bandung. Sungai - sungai tersebut mengalirkan air per tahun $\pm$ 213 milyar liter.

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Propinsi Jawa Barat skala 1:250.000 (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1966), jenis-jenis tanah yang mendominasi kawasan TNGGP adalah latosol coklat, asosiasi andosol coklat dan regosol coklat, kompleks regosol kelabu dan litosol, abu pasir, tuf, dan batuan vulkan intermedier sampai dengan basis.

Curah hujan di kawasan TNGGP termasuk dalam Tipe A (Nilai Q = 5 – 9%) berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt – Ferguson. Curah hujan yang tinggi dengan rata-rata curah hujan tahunan 3.000 mm – 4.200 mm, menyebabkan kawasan ini merupakan salah satu daerah terbasah di Pulau Jawa.

Menurut catatan vulkanologi, letusan Gunung Gede pertama kali terjadi pada tahun 1747, kemudian berturut-turut terjadi letusan pada tahun 1840, 1852, 1886, 1947 dan 1957. Akibat letusan-letusannya, kawasan TNGGP terdiri atas batuan vulkanik kuarter Gunung Pangrango dan batuan vulkanik tersier Gunung Gede. Batuan vulkanik Gunung Pangrango yaitu (a) formasi Qvpo (endapan tua, lahar dan lava, basal andesit dengan oligoklas – andesine, labradorit, olivine, piroksen dan horenbenda) yang menyebar pada bagian Utara, Barat Laut dan Barat Daya; dan (b) formasi Qvpy (endapan muda, lahar dan bersusunan andesit) pada bagian Barat.

Batuan vulkanik Gunung Gede sebagian besar terdiri atas formasi Qvg (breksi tufaan dan lahar, andesit dengan oligoklas-andesin, tekstur seperti trakhit); formasi Qvgy (aliran lava termuda) dari puncak Gunung Gede ke arah Utara sepanjang kurang lebih 2,75 km; dan formasi Qvgl (aliran lava bersusunan andesit basal). Patahan dan sesar (fault) tidak dijumpai dalam kawasan TNGGP, tetapi daerah yang rawan bencana geologi karena terjadinya sesar (pergeseran batuan/formasi) dan patahan terdapat di sebelah Selatan Sukabumi dan Cibadak.

Tipe-tipe ekosistem di kawasan TNGGP dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu :

- a. Ekosistem hutan pegunungan bawah (Sub Montana) pada ketinggian 1.000 mdpl - 1.500 mdpl;
- b. Ekosistem hutan pegunungan atas (Montana) pada ketinggian 1.500 mdpl – 2.400 mdpl dan;
- c. Ekosistem sub-alpin pada ketinggian 2.400 mdpl - 3.019 mdpl.

Selain ketiga tipe ekosistem utama tersebut, ditemukan beberapa tipe ekosistem khas lainnya yang tidak dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Ekosistem tersebut antara lain : (a) Ekosistem rawa; (b) ekosistem danau; dan (c) ekosistem hutan tanaman (perluasan).

Pada umumnya tipe ekosistem hutan pegunungan bawah dan pegunungan atas dicirikan oleh keanekaragaman jenis vegetasi yang tinggi, dengan pohon-pohon besar dan tinggi yang membentuk tiga strata tajuk. Tinggi tajuk hutan di dalam kawasan TNGGP sekitar 30 m-40 m, dan strata tertinggi didominasi oleh jenis-jenis *Litsea* spp dan *Castanopsis* spp. Sedangkan Ekosistem Hutan Sub-alpin memiliki strata tajuk sederhana dan pendek yang disusun oleh jenis-jenis pohon kecil (kerdil), dengan tumbuhan bawah yang tidak terlalu rapat. Keanekaragaman jenis vegetasi pada tipe ekosistem sub alpin ini lebih rendah dibandingkan kedua tipe ekosistem lain.

Kawasan TNGGP dengan berbagai ekosistem yang terdapat di dalamnya menyediakan habitat bagi beranekaragaman fauna, termasuk satwa yang langka dan dilindungi. Jenis-jenis satwa langka yang masih dapat dijumpai pada saat ini, antara lain primata, yaitu Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Surili (*Presbytis comata*), Lutung (*Trachypithecus auratus*) serta pemangsa seperti Macan Tutul (*Panthera pardus*), Kucing Hutan (*Felis bengalensis*), Kucing Akar (*Mustela flavigula*) dan Anjing Hutan (*Cuon alpinus javanicus*). Disamping itu terdapat pula jenis satwa lainnya seperti Sigung (*Mydaus javanensis*), Kijang (*Muntiacus muntjak*) dan Kancil (*Tragulus javanicus*).

Jenis burung (*Aves*) yang tercatat ditemukan di kawasan ini sebanyak 260 jenis (lebih dari 50% dari jenis burung yang hidup di Jawa), yang terdiri dari 19 jenis dari 21 jenis burung yang endemik Pulau Jawa (termasuk Bali), 58 jenis burung yang dilindungi, 2 jenis burung berstatus agak jarang dijumpai, 34 jenis burung berstatus jarang dijumpai, dan satu jenis yang sangat jarang dijumpai. Tiga jenis burung yang memiliki status endemik sekaligus jarang ditemukan dan dilindungi, yaitu: Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*), Celepuk Gunung (*Otus angelinae*), dan Cerecet (*Psaltia exilis*).

Selain itu, jenis burung langka dan menarik lainnya yang dapat dijumpai di kawasan ini antara lain burung hantu (*Otus angelinae*), burung luntur gunung (*Harpactes reinwardtii*), burung tulung tumpuk (*Megalaema corvina*), burung kuda (*Garrulax rufifrons*), dan burung madu gunung (*Aethopyga eximia*). Pada kawasan ini juga dapat ditemukan jenis-jenis reptilia sebanyak 75 jenis, katak sebanyak 21 jenis, serangga (Insecta) lebih dari 300 jenis, dan ditemukan pula berbagai jenis binatang lunak (Molusca).

Kawasan TNGGP memiliki aneka keindahan alam yang berpotensi menjadi objek dan daya Tarik wisata alam diantaranya berupa air terjun, air panas, goa, bumi perkemahan, jalur pendakian dengan pucuk Gunung Gede dan Gunung Pangrango, danau keindahan bentang alam serta keanekaragaman hayati.

Potensi serapan karbon sampai saat ini baru didapatkan melalui 3 (tiga) penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar (2007), Widjayanto *et al.* (2009 – 2010) dan Rahajoe, JS., *et al.* (2011). Hasil penelitian Siregar (2007) menunjukkan bahwa TNGGP memiliki potensi biomassa sebesar 551,12 ton/ha, kandungan karbon biomassa sebesar 275,56 ton/ha dan kandungan setara CO sebesar 21.010,38 ton/ha. Jenis-jenis *Castanopsis argentea* dan *Altingia excelsa* menyimpan karbon tertinggi masing-masing sebesar 70,39 ton/ha dan 54,67 ton/ha (Siregar 2007).

Penelitian dua tahun yang dilakukan oleh Widjayanto *et al.* (2009 – 2010) dari Kebun Raya Cibodas – LIPI menemukan 122 species tumbuhan berkayu pada plot-plot karbon di ekosistem TNGGP yang diduga berpotensi tinggi dalam penyerapan karbon dalam biomasnya; Beberapa species asli yang dominan di TNGGP diketahui

memiliki nilai stok karbon tersimpan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 70,36 – 591,64 ton C/hektar dihitung berdasarkan persamaan Brown (1997) dan sebesar 60,84 – 316,20 ton C/hektar dihitung berdasarkan persamaan Ketterings *et al.* (2001), yaitu *Vaccinium varingiifolium*, *Leptospermum javanicum*, *Schima wallichii*, *Altingia excelsa*, dan *Castanopsis acuminatissima*. Widjayanto *et al.* (2009 – 2010) juga menyatakan bahwa hasil pengukuran rata-rata stok karbon tersimpan pada tipe ekosistem hutan alam TNGGP adalah sebesar 276,50 ton C/hektar, sedangkan nilai rata-rata biomassa diketahui sebesar 600,92 ton/hektar dengan variasi antara 410,28 ton/hektar sampai dengan 847 ton/hektar.

Kelembagaan

TNGGP dikelola Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Eosistem setingkat eselon II dengan nama unit pengelola Balai Besar TNGGP yang berkedudukan di Cibodas. Untuk efektifitas pengelolaan, TNGGP dibagi ke dalam 3 Bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah, yaitu Bidang PTN Wilayah I Cianjur di Cianjur, Bidang PTN Wilayah II Sukabumi di Selabintana, dan Bidang PTN Wilayah III Bogor di Caringin; 6 (enam) Seksi Konservasi Wilayah dan 15 (lima belas) resort pengelolaan taman nasional. Peta Kerja Resort Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 1. Luas Desa dan Jumlah Penduduk Desa-desa yang Berbatasan Langsung (Desa Penyangga) Kawasan TNGGP per Bidang PTN Wilayah

No	Bidang PTN Wilayah	Luas Desa Penyangga (Ha)	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Bidang PTN Wilayah I Cianjur	14.050,51	90.377	83.345	173.722
2	Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	20.194,68	65.125	65.842	130.967
3	Bidang PTN Wilayah III Bogor	12.645,04	62.853	58.918	121.771
	Total	46.890,23	218.355	208.105	426.460

Sumber: Profil Desa-Desa Penyangga Kawasan TNGGP (2015)

Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dengan perempuan hampir sebanding dengan presentase 51,20% : 48,80%, di desa penyangga Bidang PTN Wilayah II Sukabumi jumlah penduduk perempuan lebih banyak dan di beberapa desa di ketiga Bidang PTN Wilayah sudah adanya kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat yang anggotanya khusus perempuan. Hal ini membuktikan bahwa potensi perempuan di desa penyangga TNGGP sudah mulai terlihat.

Kondisi usia produktif (17 – 56 tahun) dan usia non produktif (< 17 tahun dan > 56 tahun) penduduk desa penyangga TNGGP, yaitu usia produktif 55,70% dan usia non produktif 44,30%. Kondisi ini menggambarkan keseimbangan usia yang artinya ketersediaan usia produktif masa sekarang sebanding dengan usia non produktif (termasuk usia < 17 tahun) yang merupakan potensi untuk usia produktif di masa yang akan datang.

Penduduk desa di sekitar TNGGP untuk angkatan orang tua pada umumnya tamatan SD, untuk angkatan dewasa pada umumnya tamatan SMA, dan untuk anak muda sudah mulai ada yang lulus perguruan tinggi. Hal ini ditandai oleh tingkat penghidupan yang beragam untuk setiap desanya. Namun dari sarana/ prasarana

pendidikan cukup khususnya untuk pendidikan dasar SD dan SLTP, untuk melanjutkan ke jenjang SLTA dapat melanjutkan ke Ibu Kota Kecamatan dan untuk perguruan tinggi harus ke ibu kota kabupaten dan luar kabupaten.

Sebagian besar masyarakat di sekitar TNGGP pernah mengalami pendidikan baik tingkat SD, SLTP, SLTA, maupun Perguruan Tinggi (PT). Tingkat pendidikan masyarakat desa penyangga TNGGP: SD/ sederajat (57,89%), SLTP/ sederajat (23,30%), SLTA/ sederajat (15,67%), D1 – D3 (1,53%), D4 – S1 (1,49%), dan S2 – S3 (0,12%). Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat di daerah penyangga sudah relatif baik.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk di sekitar TNGGP adalah petani dan buruh tani sedangkan jenis mata pencaharian lainnya adalah wiraswasta, karyawan swasta/ buruh pabrik, pedagang, dan sebagian kecil lainnya sebagai PNS/ TNI.

Penduduk di desa penyangga pada umumnya berasal dari Etnis / Suku Sunda dan sebagian besar masyarakatnya memeluk Agama Islam.

Adat istiadat yang sering kali dijumpai pada masyarakat sekitar TNGGP adalah kegiatan gotong royong baik dalam pembangunan rumah, membersihkan sarana peribadatan, acara pernikahan, memelihara saluran air, dan juga dalam acara berkabung hal ini masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Aksesibilitas

Letak kawasan TNGGP yang berada di tengah-tengah pemukiman penduduk Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor membuat TNGGP sangat mudah dijangkau dari berbagai arah. Kantor Balai Besar TNGGP terletak di Jln Raya Cibodas Po Box 3 Sdl, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dapat dijangkau dari Jakarta melalui jalur Puncak menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dengan jarak ± 100 KM dan waktu tempuh ± 3 jam sedangkan kantor-kantor Resort Pengelolaan TNGGP memiliki akses yang mudah dilalui kendaraan Roda 4 (empat) dari masing-masing ibukota Kabupaten (Cianjur, Sukabumi dan Bogor).

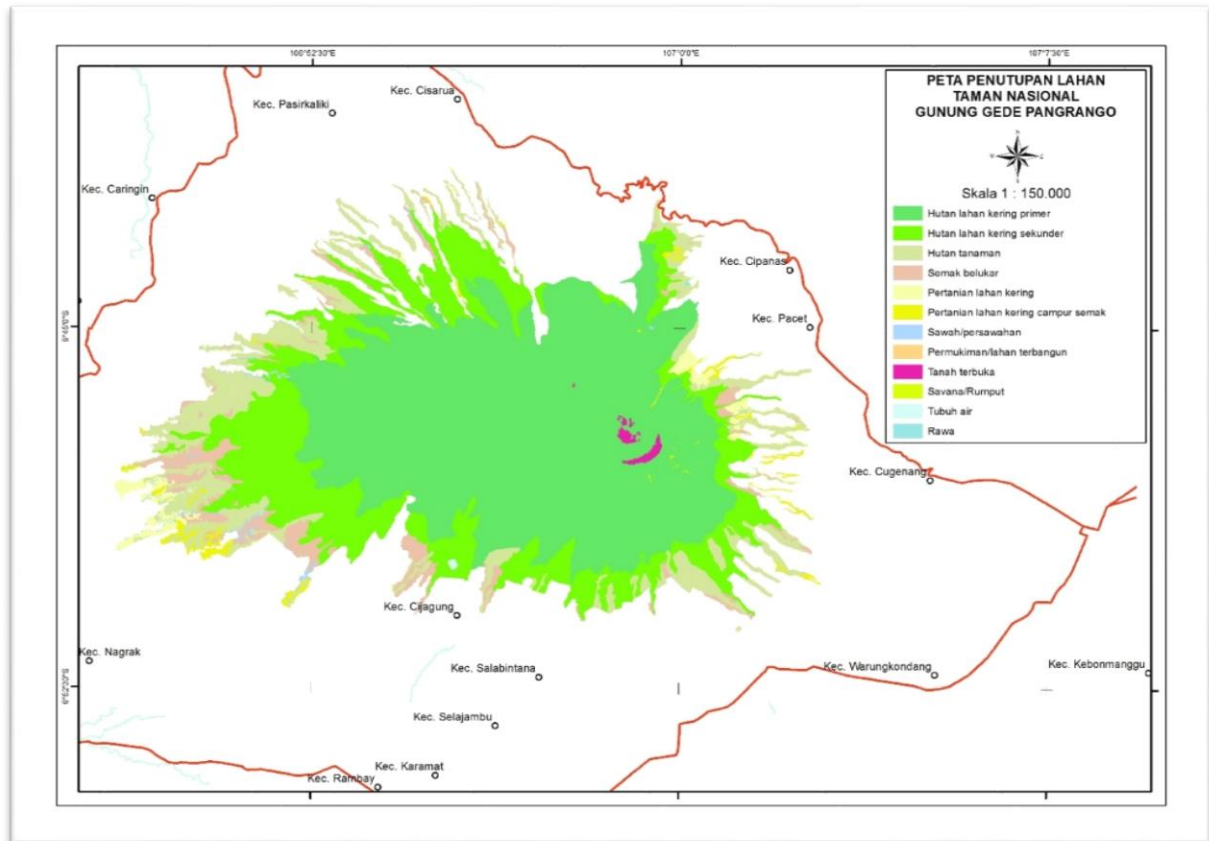
B. KONDISI SAAT INI

1. Nilai Penting Kawasan

Sesuai mandat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 tentang Penetapan Kawasan Hutan Gunung Gede Pangrango sebagai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 15.196 Ha, penetapan TNGGP ditujukan untuk **mempertahankan perwakilan tipe Hutan Hujan Pegunungan Tropis di Pulau Jawa**. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango, mandat penetapan TNGGP ditambah yaitu untuk **menyediakan habitat Surili, Owa Jawa dan Macan Tutul serta berbagai jenis burung**.

Kondisi Kawasan

Kondisi kawasan TNGGP saat ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari penampakan tutupan sebagaimana disajikan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Peta Tutupan Lahan TNGGP

Berdasarkan analisa peta tutupan lahan, kelas tutupan lahan TNGGP dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kelas Tutupan Lahan TNGGP

No	Kelas Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan lahan kering primer	12.773,92
2	Hutan lahan kering sekunder	6.166,09
3	Semak belukar	1.144,02
4	Hutan tanaman	3.176,31
5	Rumput	13,53
6	Pertanian lahan kering	503,04

No	Kelas Tutupan Lahan	Luas (Ha)
7	Pertanian lahan kering campur semak	281,46
8	Sawah / persawahan	118,69
9	Permukiman / Lahan Terbangun	1,90
10	Tanah terbuka	84,59
11	Tubuh air	11,00
12	Rawa	4,29

Luas lahan terbuka di TNGGP (kecuali kawah, alun-alun suryakencana, alun-alun mandalawangi, camping ground, danau) adalah seluas $\pm$ 903 Ha yang terdiri dari:

- pertanian lahan kering campur semak $\pm$ 281,46 ha
- Pertanian lahan kering $\pm$ 503,04 ha
- sawah dan pesawahan $\pm$ 11,09 ha

Kondisi Fauna

Berdasarkan kompilasi berbagai hasil penelitian termasuk John Mackinon, Fauna yang ada di TNGGP terdiri dari Serangga > 300 jenis, Burung > 250 jenis, Reptilia >75 jenis, Ampibia > 20 jenis, Mamalia > 110 jenis, 5 jenis primata (Owa Jawa, Surili, Lutung Jawa, Monyet Ekor Panjang, dan Kukang), dan Carnivora Besar (Macan Tutul/Kumbang). Berdasarkan hasil inventarisasi fauna yang dilakukan oleh Balai Besar TNGGP, didapatkan kelas mamalia sebanyak 27 jenis yang terdiri dari mamalia besar, mamalia sedang, dan mamalia kecil. Burung sebanyak 256 jenis. Kelas reptil sebanyak 11 jenis yang terdiri dari ular dan bunglon (Lampiran 2). Kelas amphibi sebanyak 19 jenis yang terdiri dari katak, dan kodok (Lampiran 2). Dari semua jenis fauna yang telah terinventarisasi, yang termasuk ke dalam satwa dilindungi sebanyak 17 jenis terdiri dari 9 jenis burung, 5 jenis mamalia primata, dan 4 jenis mamalia lain.

Sampai saat ini, TNGGP dianggap sebagai salah satu habitat terbaik untuk 3 satwa liar prioritas terancam punah yaitu Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Macan Tutul (*Panthera pardus melas*) dan Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*). Hal ini dapat dilihat dari

adanya temuan anakan satwa liar yang berarti masih terus berlangsungnya perkembangbiakan satwa liar secara alami di habitat alaminya.

- **Owa Jawa**

Berdasarkan beberapa hasil penelitian populasi owa jawa di TNGGP terlihat perbedaan estimasi populasi selama kurun waktu tertentu. Diketahui estimasi populasi owa jawa sebesar 447 individu (Djanubudiman dkk., 2004), sebesar 308 individu (Iskandar dkk., 2008) dan sebesar 397,5 individu (Ario dkk., 2010).

Perbedaan jumlah tersebut tidak mengindikasikan terjadinya penurunan populasi, hal ini disebabkan cakupan area penelitian dalam masing-masing survey tidaklah sama dalam ukuran luas. Namun berdasarkan bertambahnya keluarga owa jawa di beberapa lokasi di TNGGP, mengindikasikan terjadi kecenderungan peningkatan populasi owa jawa di TNGGP.

Berdasarkan hasil monitoring owa jawa pada site monitoring yang telah ditetapkan selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017), perjumpaan Owa Jawa adalah: estimasi Tahun 2015: 102-112 individu (4 jalur pengamatan), Tahun 2016: 82-115 Individu dan Tahun 2017: 89-103 Individu.



*Gambar 4. Owa Jawa
(Hylobates moloch)*

- **Macan Tutul Jawa**

Berdasarkan hasil penelitian populasi macan tutul di TNGGP, diketahui estimasi populasi macan tutul di TNGGP sebesar 21,8 individu (Ario dkk., 2009). Berdasarkan adanya temuan beberapa individu muda dalam pelaksanaan monitoring macan tutul di TNGGP, dapat dikatakan adanya populasi yang sehat dalam kawasan dan terjadi kecenderungan peningkatan populasi macan tutul.

Berdasarkan hasil monitoring macan tutul pada site monitoring yang telah ditetapkan selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017), temuan macan tutul adalah: Tahun 2015: 2 ekor, Tahun 2016: 3 ekor dan Tahun 2017: 2 ekor.



*Gambar 5. Macan Tutul Jawa
(Panthera pardus melas)*

- **Elang Jawa**

Berdasarkan hasil penelitian sejak tahun 1998-1999, tercatat populasi dan distribusi elang jawa sebanyak 11 pasang, 7 anak dan 11 floater (individu yang belum diketahui pasangannya) total 40 individu (*sumber: Siti Nuraeni, Usep Suparman dan Adam A. Supriatna /KPB CIBA final report, unpublication*), berdasarkan catatan TNGGP tahun 2003, tercatat hanya 33 individu elang jawa (*sumber: Elly Agustini dkk/TNGGP, laporan akhir, unpublication*). tahun 2003 - 2008, tercatat 65 individu yang tersebar hampir di semua Resort TNGGP, dan penemuan 16 titik sarang aktif (*sumber: Usep Suparman, dkk/RCS JHE monitoring report, unpublication*).

Jarak tiap sarang di TNGGP relatif padat yakni terdapat sarang setiap 3 km. Data terakhir berdasarkan pendugaan dengan metode modeling GIS 2009 dinyatakan berjumlah 24 pasang.

Berdasarkan hasil monitoring elang jawa pada site monitoring yang telah ditetapkan selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017), perjumpaan elang jawa adalah: Tahun 2015: 6 ekor, Tahun 2016: 17 ekor dan Tahun 2017: 12 ekor.



*Gambar 6. Elang Jawa
(Nisaetus bartelsi)*

Kondisi Flora

Berdasarkan hasil penelitian Yunghun mulai tahun 1843, Flora yang tumbuh di TNGGP terdiri dari lumut > 120 species, tumbuhan berbunga > 1500 species, tumbuhan obat > 300 species, Paku-pakuan > 400 species. Salah satu flora yang endemik tumbuh di TNGGP adalah bunga raflesia kerdil (*Rafflesia rochusinni*) dan lumut merah (*Sphagnum gedeanum*).

Berdasarkan kompilasi hasil inventarisasi yang dilakukan Balai Besar TNGGP dengan berbagai penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi dan LIPI, diperoleh jumlah jenis flora yang tumbuh di TNGGP sebanyak 925 jenis (Lampiran 1), 412 diantaranya merupakan jenis pohon (Lampiran 2) dan 199 jenis diantaranya merupakan jenis anggrek (Lampiran 3).

Gangguan Terhadap Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Masyarakat di sekitar TNGGP relatif sudah memahami arti penting keberadaan TNGGP sebagai penyangga sistem kehidupan dan tempat pengawetan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kawasan yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, walaupun batas kawasan menjari dengan lebar hanya sekitar 15 meter, kawasan TNGGP tidak terganggu. Namun demikian, di beberapa tempat masih terjadi gangguan berupa perburuan satwa liar, penggarapan kawasan dan pengambilan kayu bakar. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Gangguan Kawasan TNGGP Tahun 2013 - 2017

Tahun	Jenis Gangguan Kawasan				Upaya Pengendalian	Keterangan
	Pencurian Kayu/ Penebangan Liar	Perambahan dan Pemukiman Liar	Perburuan Liar	Pencurian Hasil Hutan Lainnya		
2013	- 21 tunggak - 16 Pohon - 197 ikat - 8 batang	-Perambahan dan pemukiman 528,46 Ha - Penyadapan 83,4 Ha	175 ekor burung;	27 btg bambu; 140 pkl kayu bakar; 3 krg getah damar; 3 btg tan. Hias; 5 tggk damar; 600 m ² tan. Kopi;	Meningkatkan patroli rutin, pembinaan dan penyuluhan, serta mengamankan barang bukti	- Tunggak : Damar, Rasamala - Pohon : Afrika, Pinus, Pakis, Rasamala - Ikat : Kayu Bakar. - Batang : Bambu, Walen,

Tahun	Jenis Gangguan Kawasan				Upaya Pengendalian	Keterangan
	Pencurian Kayu/ Penebangan Liar	Perambahan dan Pemukiman Liar	Perburuan Liar	Pencurian Hasil Hutan Lainnya		
2014	- 15 tunggak - 40 pohon - 59 batang - 68 pikul - 4 ikat - 4 karung	433,26 Ha	- 2 ekor burung Ciblek - 22 ekor burung kacamata - 4 ekor burung jenggot - 2 ekor burung kutilang - 19 ekor burung cucak gunung - 1 ekor tupai	- 381 kayu bakar - 83 batang bambu - 59 pikul ranting kering - 3 tandan rotan - 5 batang bambu tali - 26 batang bambu lengka	Meningkatkan patroli rutin, memberikan pembinaan dan penyuluhan, serta mengamankan barang bukti	- Tunggak : Damar, Muncang, Mahoni, Hamerang - Pohon : Rasamala, Ekaliptus, Huru, Damar, - Batang : Suren, Pakis, Pinus, Kisirem - Pikul : Kayu bakar - Ikat : Semak Kirinyu - Karung : Ranting Puspa

Tahun	Jenis Gangguan Kawasan				Upaya Pengendalian	Keterangan
	Pencurian Kayu/ Penebangan Liar	Perambahan dan Pemukiman Liar	Perburuan Liar	Pencurian Hasil Hutan Lainnya		
2015	- 42 Tunggak - 14 Pohon - 5 Batang	312,26 Ha	- 36 ekor burung - 1 ekor babi	- 190 Pikul Kayu Bakar - 122 Ikat Kayu Bakar - 14 Batang Bambu	Meningkatkan patroli rutin, memberikan pembinaan dan penyuluhan, serta mengamankan barang bukti	- Tunggak : Suren, Pinus, Rasamala, Damar, Mahoni. - Pohon : Kihujan, Pasang, Rasamala, Ekaliptus, Manggong. - Batang : Huru, Manii, Suren.
2016	- 20 Tunggak - 5 Pohon - 24 Batang	433,59 Ha	- 10 ekor burung	- 182 Pikul Kayu Bakar - 120 Ikat Kayu Bakar - 347 Batang Bambu	Meningkatkan patroli rutin, memberikan pembinaan dan penyuluhan, serta mengamankan barang bukti (dokumentasi)	- Tunggak : Pinus, alpukat, Damar, Mahoni - Pohon : Ekaliptus, Pinus, Mahoni. - Batang : Pinus, Afrika

Tahun	Jenis Gangguan Kawasan				Upaya Pengendalian	Keterangan
	Pencurian Kayu/ Penebangan Liar	Perambahan dan Pemukiman Liar	Perburuan Liar	Pencurian Hasil Hutan Lainnya		
2017	- 5 Tunggak - 10 Pohon - 20 Batang	433,59 Ha	- 6 ekor burung	- 124 Pikul Kayu Bakar - 64 Ikat Kayu Bakar - 280 Batang Bambu	Meningkatkan patroli rutin, memberikan pembinaan dan penyuluhan, serta mengamankan barang bukti (dokumentasi)	- Tunggak : Pinus, Manglid - Pohon : Pinus, Manglid, Mahoni, Suren - Batang : Kaweni, Mara, Afrika

Aktifitas Wisata

Aktifitas wisata alam di TNGGP belum berjalan optimal, kunjungan masih terbatas pada wisatawan nusantara dan belum menjadi tujuan wisatawan mancanegara termasuk pendakian. Hal ini disebabkan karena karakteristik objek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) yang ada di TNGGP banyak dimiliki kawasan lain (tidak memiliki ODTWA yang khas), kurang promosi, tidak memiliki jaringan travel yang lebih luas (mancanegara) dan sarana prasarana yang belum memadai maka TNGGP kalah bersaing dari kawasan lain seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Namun demikian, pendakian Gunung Gede dan Gunung Pangrango sudah menjadi kiblat pendakian di Indonesia. Pendakian Gunung Gede Pangrango merupakan yang pertama menerapkan system booking online dan pembatasan jumlah pendaki berdasarkan quota serta sejak 5 tahun terakhir dijadikan tempat lomba lari gunung bertaraf internasional (GP 100).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktifitas wisata di TNGGP, setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan meningkat, yang paling signifikan pada

Tahun 2018. Perolehan PNBП selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.

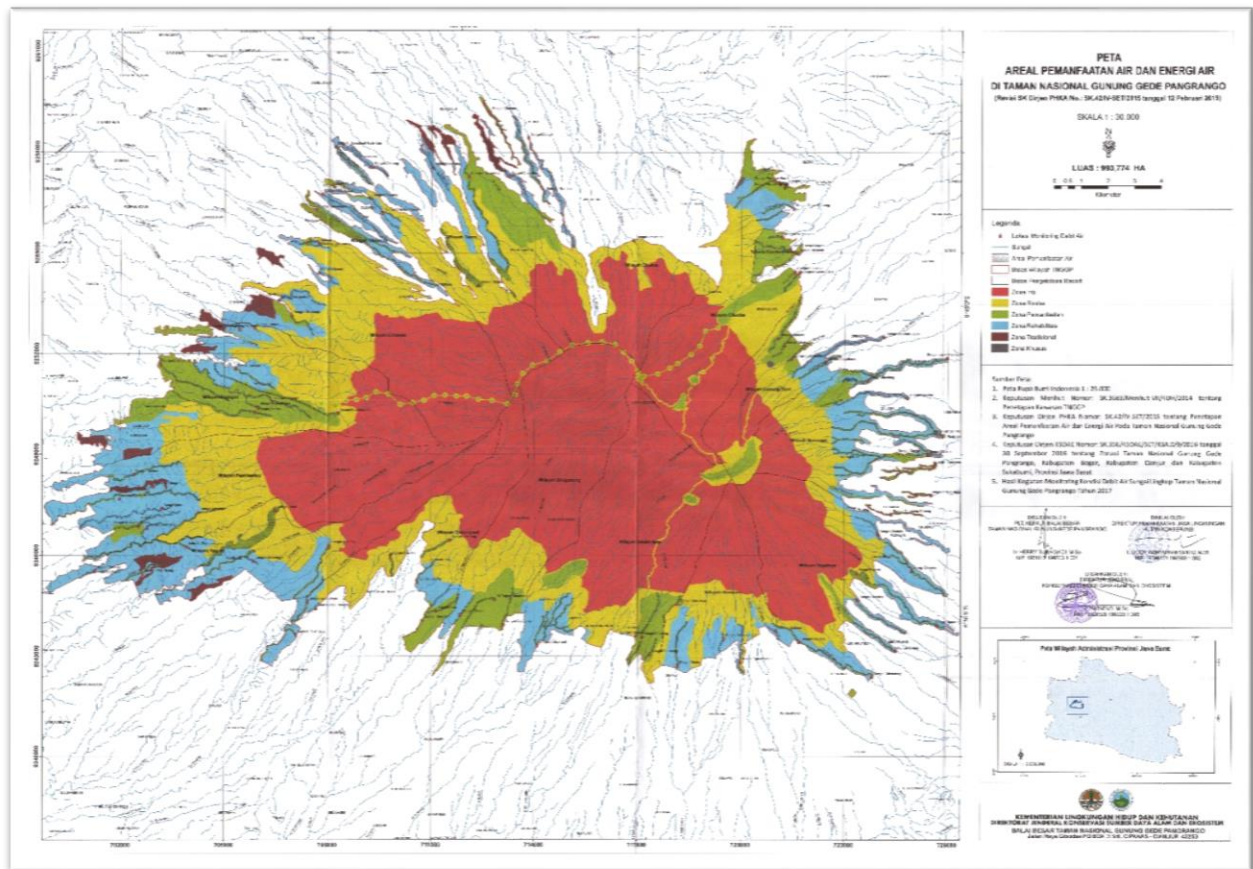
Tabel 4. Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2015 - 2018

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	2,300.000.000	5,929,081.723
2	2017	3,545,700,000	3,632,273,580
3	2016	2,040,150,265	3,855,213,447
4	2015	682,000,000	3,352,992,381

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Lainnya

Selain wisata alam, jasa lingkungan TNGGP lainnya yang telah dimanfaatkan baru sebatas pemanfaatan air secara non komersial dengan pemanfaat air adalah masyarakat sekitar kawasan TNGGP.

Potensi air di TNGGP sangat melimpah sehingga TNGGP dijuluki sebagai reservoir air. Hasil penelitian Dasusman pada Tahun 1993, diperoleh estimasi potensi air di TNGGP mencapai 300.672.000 liter per hari atau 110.000.000 m³ per tahun. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Otto Sumarwoto pada tahun 1994 diperkirakan debit air di TNGGP mencapai 231 milyar liter per tahun dan berdasarkan hasil monitoring debit air oleh BBTNGGP pada tahun 2017, kondisi debit air pada saat pengambilan di 94 titik pengamatan pada areal pemanfaatan air yang telah ditetapkan adalah 17.740,18 liter. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 7.



Sampai saat ini, pemanfaat air secara komersial baru ada 1 perusahaan dan itu pun belum beroperasi. Sebenarnya air yang dihasilkan TNGGP banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan air minum dalam kemasan di sekitar TNGGP namun titik pengambilan airnya (intake) berada di luar kawasan sehingga kepada perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa dikenakan mekanisme perijinan karena sesuai peraturan Menteri Kehutanan P. 64 tahun 2013 hanya yang intake nya di dalam kawasan, pemanfaatan air dilakukan melalui mekanisme perijinan.

Melalui berbagai upaya penyadartahuan, beberapa perusahaan pemanfaat air di luar kawasan TNGGP seperti PT. Tirta Investama dan PT Mayora mau berkontribusi untuk terlibat dalam upaya pemulihan ekosistem TNGGP yang terindikasi rusak sebagai *recharge area* serta pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme kerjasama.

Kontribusi perusahaan ini merupakan praktik dari *Payment Environmental Services* (PES).

2. Isu Strategis Pengelolaan

a. TNGGP sebagai Pusat Pendakian/wisata alam lainnya

TNGGP sebagai pusat pendakian / wisata alam lainnya belum optimal dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

Wisata Alam di TNGGP belum sepenuhnya didasarkan pada perencanaan dan kajian daya dukung ODTWA

Kondisi saat ini, kelengkapan administrasi dalam pengelolaan sebuah ODTWA belum sepenuhnya dipenuhi seperti dokumen desain tapak, masterplan, siteplan, DED dan kajian daya dukung. Padahal kelengkapan administrasi ini penting sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan sebuah ODTWA.

Pengelolaan ODTWA perlu diintegrasikan dalam sebuah dokumen masterplan pengelolaan wisata alam TNGGP, dimana dokumen ini akan mensinergikan mensinkronkan pengelolaan wisata alam secara keseluruhan di zona pemanfaatan TNGGP.

Saat ini, beberapa ODTWA dikelola tidak berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan wisata, seperti ODTWA Situgunung, Barubolang, Gunung Putri dan Cibodas. Namun kedepannya perlu segera disusun perencanaan pengelolaan wisata alam yang jelas dan strategis mengingat bahwa beberapa ODTWA tersebut akan menjadi destinasi wisata potensial, dikhawatirkan dengan lonjakan jumlah pengunjung seperti yang terjadi saat ini di Situgunung akan berdampak negatif baik secara sosial ekonomi maupun ekologis.

Dokumen administrasi perencanaan wisata alam disusun dalam rangka mengkaji, mendesain, mengantisipasi pengelolaan wisata pada kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, sehingga pengelolaan wisata yang sustainable dapat tercapai.

Pengunjung Belum Sadar Lingkungan

Sampai saat ini, pengunjung baik yang melakukan pendakian maupun wisata alam belum sepenuhnya sadar lingkungan, hal ini dilihat dari masih banyaknya sampah yang ditinggalkan pengunjung di sepanjang jalur pendakian, terutama di tempat-tempat kemping serta tempat wisata lainnya. Hasil operasi bersih gunung yang dilakukan pada setiap tahun menunjukkan masih banyaknya sampah terutama plastik yang diturunkan dari gunung. Data hasil operasi bersih gunung dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Sampah Hasil Operasi Bersih Gunung dari Tahun 2015 - 2017

2015			2016			2017		
Pendaki	Sampah	Komposisi	Pendaki	Sampah	Komposisi	Pendaki	Sampah	Komposisi
66,803	3,6 Ton	✓ 62% sampah plastik, ✓ 10% sampah besi/logam, ✓ 10% sampah kain, ✓ 5% sampah kaca, ✓ 3% sampah B3 Baterai, lampu bekas dan aki, ✓ 5% sampah kertas, ✓ 5% sampah sisa makanan,	68,242	2,075 Ton	✓ 80% sampah plastik ✓ 10 % sampah kain ✓ 10 % sampah kaca dan kaleng	49.323 (13 November 2017)	2,7 Ton	-

Keberadaan sampah dalam kawasan TNGGP, selain membuat tidak indah objek wisata juga dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan terutama air.

Pencemaran air dari sampah berupa rembesan air lindi ke tanah dan sungai. Lindi atau air sampah yang baunya sangat menyengat, adalah substansi cairan yang dihasilkan dalam proses pembusukkan sampah. Seringkali lindi bercampur dengan air hujan sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak. Lindi mengandung zat berbahaya apalagi jika berasal dari sampah campur. Keberadaan air lindi dalam kawasan konservasi menjadi permasalahan yang sangat penting karena fungsi kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan.

Sarana Prasarana Wisata Alam

Sebagian obyek dan daya Tarik wisata alam di TNGGP belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana wisata utama seperti toilet, tempat pengolahan sampah, penginapan, tempat makan, souvenir dan Information center belum tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang baik.

Sarana dan prasarana pada ODTWA di Kawasan konservasi bukan yang utama, namun ketersediaan standar minimalnya perlu dipenuhi untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung wisata.

Belum didukung oleh masyarakat pendukung wisata yang professional

Pelibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan wisata di TNGGP adalah sebuah keharusan, mengingat tingginya ketergantungan masyarakat pada Kawasan TN. Beberapa ODTWA seperti Cibodas dan Mandalawangi telah menjadi sumber kehidupan utama masyarakat disekitarnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan wisata alam, diperlukan pelaku wisata (khususnya masyarakat lokal) yang telah tersertifikasi kompetensinya. Kondisi saat ini, masyarakat lokal yang bergerak di wisata alam belum dilengkapi kemampuan dan kemampuan yang memadai, sehingga kedepanya perlu bimbingan dan pembinaan secara berkelanjutan dan berjenjang untuk menghasilkan pelaku wisata alam yang teruji dan tersertifikasi.

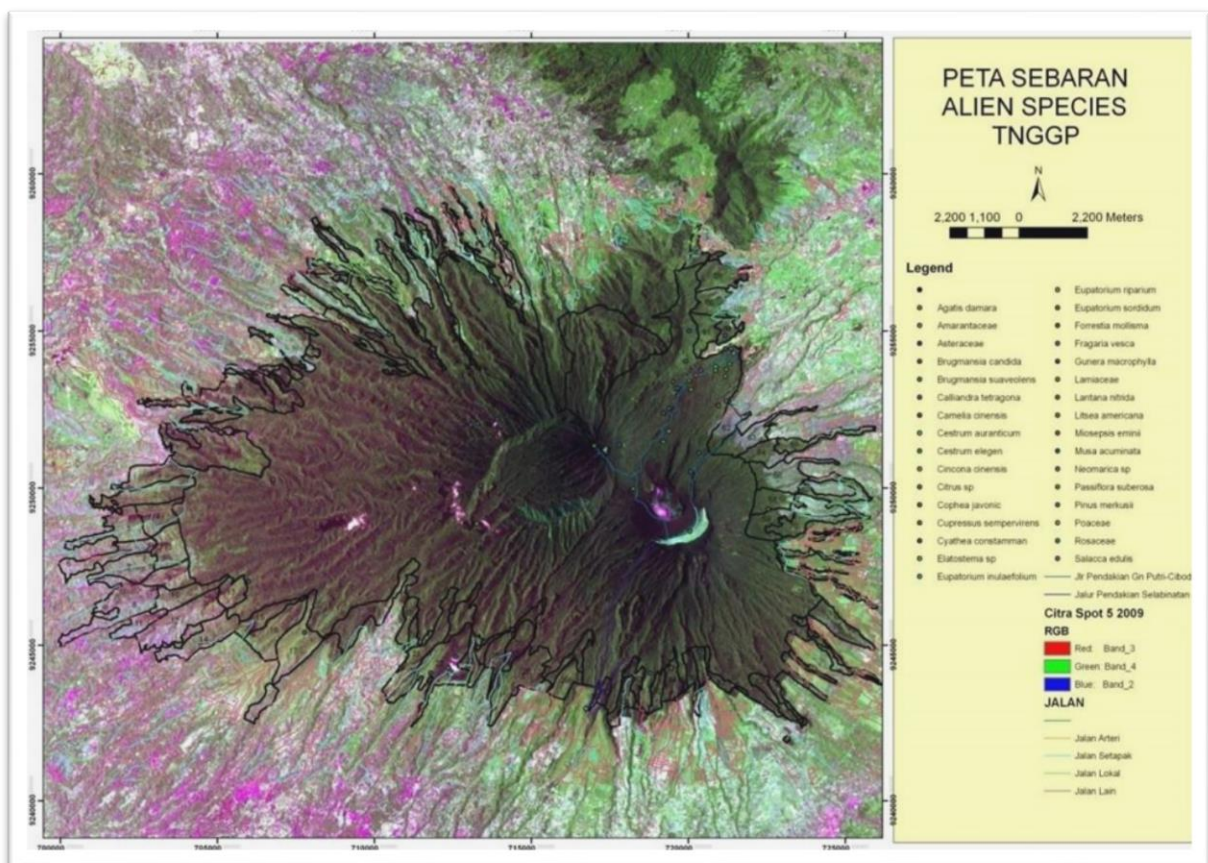
b. TNGGP sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati

TNGGP sebagai pusat keanekaragaman hayati belum optimal dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

Species Invasive

Keberadaan spesies yang bersifat invasive di TNGGP baik spesies asing maupun spesies asli dapat membahayakan kesehatan ekosistem asli TNGGP serta merusak habitat satwa liar sehingga dapat mengancam nilai penting TNGGP.

Identifikasi dan inventarisasi alien species atau tumbuhan eksotik pada tahun 2006 khususnya pada kawasan hutan sub montana, montana dan sub alpin menunjukkan bahwa di kawasan TNGGP terdapat 35 jenis tumbuhan eksotik/*alien species* yang terdiri dari 7 jenis yang bersifat invasif (*Invasive Alien Species*/IAS) dan 28 jenis lainnya bersifat non invasif (Lampiran 4) dan distribusi Alien Species dapat dilihat pada Gambar 7. Tumbuhan tersebut tersebar pada ketinggian 1200 sampai dengan 2700 mdpl



Gambar 8. Penyebaran Alien Species di TNGGP

Konflik antara Manusia dengan Satwa Liar

Konflik antara manusia dan satwa liar di sekitar TNGGP relatif masih kecil hal ini dimungkinkan karena habitat dan pakan dalam kawasan TNGGP masih baik. Dalam setiap tahun, sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2018, kejadian konflik antara manusia dan satwa liar di sekitar TNGGP berkisar antara 2 - 3 kejadian per tahun dengan satwa yang terlibat konflik yaitu macan tutul, kera ekor panjang dan babi hutan.

Konflik antara manusia dan satwa liar di sekitar TNGGP kemungkinan besar akan semakin meningkat seiring dengan adanya perubahan kebijakan pengelolaan daerah penyangga TNGGP.

Perburuan satwa liar

Perburuan liar masih merupakan salah satu ancaman besar akan kelestarian satwa di TNGGP terutama burung. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2017 terjadi 17 kasus dengan barang bukti alat berburu berupa 5 pucuk senapan angin, 2 pucuk senjata api rakitan, 7 ekor anjing, 9 set jaring kabut, 6 buah sangkar burung dan peralatan berburu tradisional lainnya seperti jerat dan getah pohon teureup. Barang bukti hewan buruan yang tertangkap adalah 2 ekor babi dan 54 ekor burung, 2 di antaranya dilindungi yaitu cica matahari dan takur api. Perburuan yang akhir-akhir ini sedang tren yaitu perburuan burung untuk dijual (menggunakan jaring, jerat dan getah pohon) dengan dugaan karena jumlah penyuka burung semakin banyak dan didukung oleh harga burung kicauan di pasaran yang tetap tinggi.

Selain perburuan burung, yang marak terjadi di TNGGP adalah perburuan cacing sonari. Perburuan cacing sonari menjadi masalah besar bagi kelestarian TNGGP karena cacing sonari berada di atas ketinggian 2.200 m (zona inti) dan hidup di dalam akar kadaka yang ada di atas pohon sehingga untuk mengambil cacing sonari, pemburu menebang pohon.

Perburuan liar relatif mudah untuk dideteksi karena peralatan berburu yang dipasang bisa kasat mata (jaring dan jerat) dan gonggongan anjing bisa terdengar dalam jarak

yang cukup jauh. Akan tetapi penanganannya dirasakan cukup sulit karena para pemburu lebih aktif waktu malam hari sampai matahari terbit, sedangkan di waktu siang mereka sudah berada di rumahnya masing-masing melakukan aktifitas pekerjaan keseharian. Hal lain yang cukup menyulitkan adalah mereka lebih gesit menghindar/berlari di dalam hutan dari pengejaran petugas.

Penyelesaian hukum secara pidana kehutanan hanya dapat menjerat para pemburu apabila ada barang bukti berupa satwa yang dilindungi, sedangkan apabila tidak ada walaupun ketahuan mereka di dalam kawasan dan membawa alat-alat berburu, tidak dapat diproses secara hukum karena sampai saat ini tidak ada dasar hukum Undang-Undang untuk menjerat mereka, jadi hanya merupakan pelanggaran memasuki kawasan saja.

Penggarapan kawasan

Penggarapan kawasan oleh masyarakat masih merupakan isu strategis bagi TNGGP terutama di areal perluasan (eks Perum Perhutani) dimana pada saat dikelola Perum Perhutani areal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan penggarapan oleh masyarakat melalui PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

Selama kurun waktu awal penyerahan dari Perum Perhutani sampai saat ini, upaya penyelesaian penggarapan terus dilakukan melalui berbagai pendekatan kepada masyarakat penggarap dengan melibatkan berbagai pihak. Penyelesaian penggarapan memegang prinsip tidak menyakiti masyarakat, masyarakat bisa mandiri dan tidak tergantung lagi ke kawasan serta kawasan dapat dipulihkan ekosistemnya.

Jumlah penggarap pada awal penyerahan kawasan dari Perum Perhutani ke Balai TNGGP adalah sekitar 2019 KK dengan luas garapan $\pm$ 2.005 Ha yang tersebar di 3 Bidang PTN Wilayah. Perkembangan terakhir penggarap dalam kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Penggarap TNGGP 2015-2017

No	Bidang PTN	Jumlah Penggarap & Luas Garapan 2015		Jumlah Penggarap & Luas Garapan 2016		Jumlah Penggarap & Luas Garapan 2017	
		Penggarap KK/ Orang	Luas (ha)	Penggarap KK/ Orang	Luas (ha)	Penggarap KK/ Orang	Luas (ha)
1	Wil. I Cianjur	705 KK	130,12	705 KK	130,12	705 KK	130,12
2	Wil. II Sukabumi	717 KK	312,26	592 KK	259,35	592 KK	259,35
3	Wil. III Bogor	249 orang	82,27	212 orang	61,56	154 orang	44,12
Jumlah		1671 orang	524,65	1509 orang	451,03	1451 orang	433,59

Kemantapan Kawasan

Secara hukum, keberadaan TNGGP telah mempunyai kepastian hukum karena telah selesai ditata batas temu gelang dengan panjang batas 364.967,35 Km dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNGGP di Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor Provinsi Jawa Barat, luas kawasan TNGGP ditetapkan 24.270,80 ha.

Pada Tahun 2004-2005, BPKH Wil XI Yogyakarta telah melakukan orientasi batas kawasan dengan panjang batas $\pm$ 375,198 Km dan rekonstruksi batas pada Tahun 2005 sepanjang 56,210 km, Tahun 2006 sepanjang 272,436 km, Tahun 2010 sepanjang 25,20 km, Tahun 2011 sepanjang 25,725 km, Tahun 2013 sepanjang 19,36 km dan Tahun 2014 sepanjang 23,195 km.

Namun demikian, fakta di lapangan, pada beberapa bagian batas kawasan terdapat permasalahan antara lain:

- 1) Terdapat kawasan yang belum masuk di peta penetapan, yaitu blok PHPA di Bidang Wilayah Bogor.
- 2) Terdapat batas kawasan yang berbeda posisi antara lampiran SK penetapan dengan kondisi lapangan.
- 3) Terdapat batas kawasan yang berbeda posisi antara lampiran SK penetapan dengan hasil rekonstruksi.
- 4) Base data pal batas belum lengkap terutama hasil Rekonstruksi 2006 (tdk ada register pal)

5) Masih adanya pal batas yang hilang.

Dengan adanya fakta di lapangan tersebut di atas dapat menimbulkan ketidakpastian batas kawasan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan konflik tenurial karena adanya klaim masyarakat baik perorangan maupun korporasi terhadap kawasan.

c. TNGGP sebagai Pusat Kehidupan Masyarakat

Keberadaan TNGGP belum sepenuhnya menjadi pusat kehidupan masyarakat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Keanekaragaman hayati di TNGGP belum dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat

TNGGP memiliki Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak kurang dari 300 jenis tumbuhan obat ada di TNGGP. Selain itu satwa kecil seperti cacing kalung dan cacing sonari diyakini masyarakat sangat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit namun potensi keanekaragaman hayati tersebut belum satupun yang dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kawasan konservasi, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara langsung adalah suatu hal yang tidak mungkin maka peran institusi yang berkompeten dalam penelitian dan pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk menemukan teknologi pemanfaatan keanekaragaman hayati (budidaya/penangkaran) sehingga terbentuk jejaring antara sumber daya, peneliti (pengembang teknologi) dan masyarakat. Dengan demikian, potensi keanekaragaman hayati yang ada di TNGGP dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengganggu populasi di alam.

Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pemanfaatan ODTWA TNGGP

Pengelolaan dan pemanfaatan wisata alam di TNGGP merupakan peluang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat penyangga kawasan. Berdasarkan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan kunjungan wisatawan ke TNGGP, dapat diprediksi nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas wisata ini.

Beberapa ODTWA yang melibatkan pihak ketiga seperti di Situgunung, memperlihatkan lonjakan kunjungan hanya dalam waktu satu tahun, demikian juga dengan pengelolaan wisata pendakian yang stabil jika dilihat dari kunjungan wisatawan. Namun demikian, masyarakat sekitar kawasan belum sepenuhnya secara legal dan teradministrasi yaitu dalam bentuk izin terlibat secara penuh dan aktif dalam memanfaatkan hal tersebut, meskipun dampak manfaat dari aktivitas wisata tersebut telah terasa seperti: adanya aktivitas ekonomi seperti warung, penginapan, penyediaan jasa reservasi tiket pendakian, dan sebagainya.

Dalam sepuluh tahun kedepan, tidak hanya legalisasi masyarakat dalam pemanfaatan wisata alam yang akan didorong melalui skema wisata berbasis masyarakat, namun kehidupan sosial masyarakat akan ikut terdorong melalui kegiatan wisata ini, seperti: penguatan kearifan lokal, penguatan kelembagaan dan entitas-entitas sosial dalam masyarakat pun akan tergali dan diperkuat.

Perubahan kebijakan pengelolaan daerah penyangga (perubahan fungsi perkebunan HGU)

Sebagian besar kawasan TNGGP di wilayah Sukabumi berbatasan langsung dengan lahan Hak Guna Usaha (HGU) berupa perkebunan teh yang masa berlakunya berakhir pada Tahun 2019. Lahan HGU ini menjadi daerah penyangga bagi TNGGP karena lahan HGU yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGGP merupakan hutan sekunder (perkebunan yang tidak produktif) dan menjadi daerah jelajah satwa liar terutama Macan Tutul Jawa. Daerah penyangga ini menjadi isu strategis dalam pengelolaan TNGGP ke depan karena adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang tidak ingin memperpanjang HGU dan telah merencanakan pengembangan bekas areal HGU dimaksud menjadi kawasan agro wisata dan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan dll yang menurut rencana akan dibangun berdampingan dengan batas TNGGP.

Dengan adanya kebijakan tersebut, tekanan terhadap TNGGP ke depan semakin besar karena aktifitas manusia semakin dekat dengan kawasan dan akan

meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar karena daerah jelajahnya telah berubah fungsi.

C. ANALISA SWOT

Untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan TNGGP sepuluh tahun kedepan perlu terlebih dahulu mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki TNGGP dan peluang serta ancaman dari luar dari masing-masing isu strategis yang akan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan TNGGP. Analisis SWOT diarahkan pada 3 hal pokok yang menjadi isu strategis yaitu 1) TNGGP sebagai pusat pendakian dan wisata alam; 2) TNGGP sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan 3) TNGGP sebagai Pusat Kehidupan Masyarakat. Analisis SWOT didekati menggunakan metode kuantitatif dari data hasil *Focus Group Discussion* (FGD) staf TNGGP. Metode kuantitatif digunakan untuk dapat memetakan arah strategi dari penilaian bobot dan skor hasil diskusi. Pembobotan dilakukan didasarkan pada frekuensi kemunculan suatu pernyataan yang ditulis dalam metaplan oleh peserta FGD dan yang dibahas dalam menentukan analisa SWOTT adalah pernyataan yang dominan (kekuatan, kelemahan, Peluang dan ancaman) . Berdasarkan data kuantitatif dengan rincian skor yang telah teridentifikasi maka hasil identifikasi SWOT untuk masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Identifikasi SWOT TNGGP sebagai Pusat Pendakian dan Wisata Alam lainnya

Kekuatan	Score (+)	Kelemahan	Score (-)
- TNGGP menjadi kiblat pendakian di Indonesia karena yang pertama menerapkan booking online dan pembatasan pendaki melalui kuota - Adanya potensi wisata yang masih dapat dikembangkan - Variasi potensi ODTWA beragam mulai dari aneka curug, keindahan landscape, danau, jalur pendakian, air panas dll - Jalur pendakian relatif mudah dan dapat dijadikan jalur interpretasi pendidikan konservasi	0,2 0,1 0,1 0,2	- Pelaksanaan wisata alam di TNGGP belum sepenuhnya didasarkan pada perencanaan yang komprehensif - Sarana prasarana pendukung wisata alam / pendakian belum memadai, ramah penyandang disabilitas dan belum berbasis pendidikan konservasi - Pengelolaan sampah dan pendaki illegal belum sepenuhnya optimal - Belum adanya intepreter dari masyarakat untuk mendukung pendidikan konservasi	0,1 0,1 0,1 0,1
Total	+0,6	Total	-0,4
Peluang	Score (+)	Ancaman	Score (-)
- Minat masyarakat terhadap Pendakian dan wisata sangat tinggi - Lokasi yang strategis (jarak berdekatan dengan pusat kota) sehingga akses sangat mudah - Adanya mitra yang menaruh perhatian pada pengembangan wisata alam - Banyak Investor yang tertarik dalam bisnis wisata alam di TNGGP	0,2 0,2 0,1 0,1	- Belum didukung pengunjung yang sadar lingkungan sehingga aktifitas wisata termasuk pendakian masih meninggalkan sampah di gunung, vandalisme dan pencemaran air. - Masyarakat pendukung wisata alam belum sepenuhnya profesional - Adanya pendakian illegal, baik jalurnya maupun pendakinya - Terdapat praktek percaloan pendaki	0,1 0,05 0,05 0,2
Total	+0,6	Total	-0,4

Tabel 8. Hasil Identifikasi SWOT TNGGP sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati

Kekuatan	Score (+)	Kelemahan	Score (-)
- 3 tipe ekosistem (Sub Montana, Montana dan Sub alpin) TNGGP yang merupakan habitat satwa liar kondisinya relatif baik dan merupakan laboratorium kehati bagi para peneliti - Memiliki satwa yang relatif lengkap sampai top predator - Menjadi sumber plasma nutfah dan memiliki potensi tanaman obat yang melimpah - Memiliki Stasiun Penelitian Bodogol dan Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol yang didukung dengan modul, SDM dan mitra dalam rangka perlindungan, pengawetan, penelitian dan pemanfaatan Kehati	0,2 0,1 0,2 0,1	- Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan dan keanekaragaman hayati belum sepenuhnya optimal - Potensi keanekaeagaman hayati belum sepenuhnya terdata dengan baik, baik jenis maupun sebarannya karena belum didukung kapasitas SDM yang memadai . - Jenis tumbuhan langka belum menjadi perhatian - Hasil penelitian belum sepenuhnya terimplementasi ke dalam aspek pemanfaatan serta belum ada protokol penggunaan plasma nutfah untuk budidaya masyarakat	0,2 0,1 0,1 0,1
Total	+0,6	Total	-0,5
Peluang	Score (+)	Ancaman	Score (-)
- TNGGP merupakan hutan hujan tropis yang masih utuh dekat dengan pusat kota besar - Akses mudah dekat dengan ibukota sebagai laboratorium kehati - Adanya dukungan para pihak untuk mendukung rehabilitasi, pendidikan konservasi dan peningkatan populasi owa jawa - Adanya dukungan para pihak untuk mendukung monitoring, rehabilitasi dan peningkatan populasi elang jawa - Adanya dukungan MMP dan MPA dalam rangka melindungi Kehati	0,2 0,1 0,1 0,1 0,1	- Masih terdapat tekanan terhadap keberadaan kehati berupa perburuan dan penggarapan kawasan yang dapat mengancam keberadaan kehati TNGGP - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya keberadaan TNGGP sebagai pusat keanekaragaman hayati - Adanya Jenis Invasive - Masih terjadi konflik satwa liar dengan manusia - Jalur persinggahan burung migran	0,1 0,1 0,1 0,05 0,05
Total	+0,6	Total	-0,4

Tabel 9. Hasil identifikasi SWOT TNGGP sebagai Pusat Kehidupan Masyarakat

Kekuatan	Score (+)	Kelemahan	Score (-)
- Jasa lingkungan yang terkandung dalam kawasan TNGGP dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat seperti wisata alam, HHBK (zona tradisional), tanaman Obat dan air - Sumber Plasma nutfah untuk mendukung budidaya - TNGGP sebagai penyeimbang ekosistem kehidupan manusia disekitarnya - Aturan pemanfaatan kawasan konservasi mendukung	0,2 0,05 0,1 0,05	- Potensi kehati TNGGP belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Jabatan Fungsional Tertentu masih berjalan sendiri-sendiri, belum sepenuhnya terintegrasi untuk mewujudkan TNGGP sebagai pusat kehidupan masyarakat berbasis pendidikan konservasi - Potensi sumberdaya air belum sepenuhnya terpetakan dan termonitor dengan baik secara reguler serta belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat (masih terbatas pada ijin nonkomersial) - Program pemberdayaan belum sepenuhnya mampu menjawab problem masyarakat	0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Total	+0,4	Total	-0,6
Peluang	Score (+)	Ancaman	Score (-)
- TNGGP sebagai zona inti Cagar Biosfer Cibodas - Adanya Dukungan dari NGO lokal untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam TNGGP - Jumlah desa penyangga yang banyak bisa menjadi benteng pertahanan TNGGP - Adanya dukungan stakeholder pemerintahan tingkat I yang menaungi tiga pemerintahan kabupaten dalam pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas	0,1 0,2 0,1 0,2	- Masih terbatasnya kesadartahuan masyarakat - Tingginya Kebutuhan lahan pertanian - Masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat TNGGP - Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah - Masyarakat masih berorientasi pada pemanfaatan secara langsung dari kawasan hutan	0,1 0,1 0,1 0,05 0,05
Total	+0,6	Total	-0,4

Berdasarkan hasil skoring, telah terpetakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan TNGGP. Dari faktor internal, untuk indikator TNGGP sebagai Pusat Pendakian memiliki skor kekuatan +0,6 dan kelemahan dengan skor -0,4 sehingga total skor adalah +0,2. Sedangkan untuk indikator TNGGP sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati memiliki skor kekuatan sebesar +0,6 dan kelemahan dengan skor -0,5 sehingga total skor adalah +0,1. Untuk indikator TNGGP sebagai Pusat Kehidupan Masyarakat memiliki skor kekuatan sebesar +0,4 dan kelemahan dengan skor -0,6 sehingga total skor menjadi -0,2.

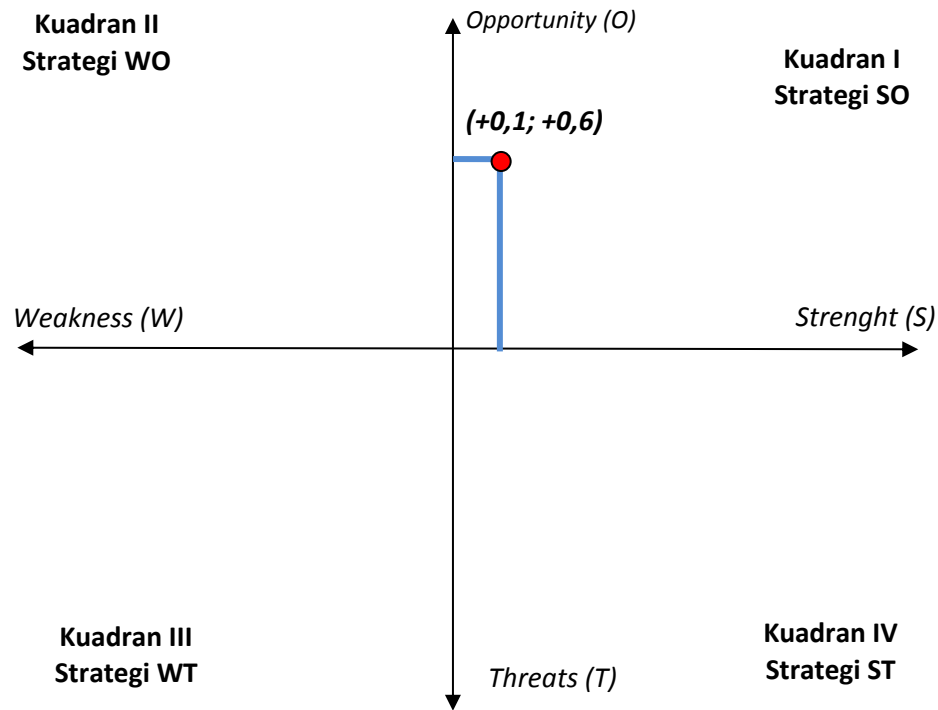
Sedangkan dari aspek eksternal, untuk indikator TNGGP sebagai Pusat Pendakian memiliki skor peluang +0,6 dan ancaman sebesar -0,4 sehingga total skor menjadi +0,2. Untuk indikator TNGGP sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati memiliki skor peluang +0,6 dan ancaman -0,4 sehingga total skor menjadi +0,2. Sedangkan untuk indikator TNGGP sebagai Pusat Kehidupan Masyarakat juga memiliki skor peluang +0,6 dan ancaman -0,4 sehingga total skor menjadi +0,2.

Hasil scoring penilaian bobot masing-masing isu strategis dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil *Score* Penilaian Bobot

Faktor	Unsur	Indikator			Score Total
		Pusat Pendakian	Pusat Kehati	Pusat Kehidupan Masyarakat	
Internal	Kekuatan	+0,6	+0,6	+0,4	+0,1
	Kelemahan	-0,4	-0,5	-0,6	
	Total	+0,2	+0,1	-0,2	
Eksternal	Peluang	+0,6	+0,6	+0,6	+0,6
	Ancaman	-0,4	-0,4	-0,4	
	Total	+0,2	+0,2	+0,2	

Berdasarkan Tabel 11 di atas, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan yang dimiliki Balai Besar TNGGP relatif lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya serta memiliki peluang yang lebih dominan dibandingkan dengan ancaman. Apabila digambarkan dalam kuadran SWOT, maka *score* total dalam Tabel 10 berada dalam kuadran I sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 9.



Gambar 9. Pilihan Strategi SWOT Rencana Pengelolaan TNGGP

Berdasarkan situasi yang tergambarkan dalam Gambar 8 tersebut di atas, maka Rencana Pengelolaan TNGGP untuk tahun 2019-2028 akan terfokus untuk menghilangkan kelemahan serta memanfaatkan peluang sehingga strategi yang dipilih pada pemetaan antar faktor adalah strategi kuadran I (SO) yaitu meningkatkan **manajemen internal untuk dapat merespon peluang kedepan** dan atau **merespon peluang masa depan dalam rangka meningkatkan manajemen internal**. Berdasarkan pilihan strategi kuadran II tersebut maka rincian arah strategi tertuang dalam tabel 11.

Tabel 11. Pemetaan interaksi antar faktor untuk strategi Rencana Pengelolaan TNGGP

Faktor Internal	Faktor Eksternal	
	P E L U A N G	
K E K U A T A N	1	Mengintensifkan upaya-upaya pemulihan ekosistem bersama mitra
	2	Mengintensifkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan bersama masyarakat
	3	Integrasi seluruh aspek pengelolaan dengan konsep pendidikan konservasi
	4	Mengintensifkan upaya-upaya penyadartahuan masyarakat dan pendampingan pengembangan usaha alternative ekonomi lainnya
	5	Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan satwa liar lainnya bersama mitra
	6	Mengintensifkan upaya-upaya monitoring dan penguatan database keanekaragaman hayati bersama mitra
	7	Mengembangkan wisata alam dengan standar pengelolaan internasional bersama masyarakat
	8	Menerapkan pelayanan prima bertaraf internasional (ISO 9001) dan penyadartahuan pendakian
	9	Memastikan Pemanfaatan air berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat desa penyangga
	10	Mengoptimalkan pemanfaatan Kehati sebagai sumber plasma nutfah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

D. KONDISI YANG DIINGINKAN

Memperhatikan issue strategis dalam pengelolaan TNGGP saat ini, maka kondisi TNGGP yang diinginkan 10 (sepuluh) tahun ke depan adalah:

1. TNGGP sebagai perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa tetap terjaga.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang sangat tinggi. Secara ekologis, Taman Nasional berperan sebagai system penyangga kehidupan, menyangga kehidupan tidak kurang dari 30 juta orang, bukan hanya sekitar kawasan tapi jauh sampai ke hilir, yaitu Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang dan Bandung karena TNGGP menjadi bagian dari hulu 4 DAS besar di Jawa Barat yaitu Citarum, Ciliwung, Cisadane dan Cimandiri.

Sedangkan secara ekonomi, TNGGP memiliki nilai yang sangat tinggi baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat secara langsung meliputi terjaminnya

sumber air dan aktifitas rekreasi sedangkan secara tidak langsung adalah manfaat fungsional dari TNGGP berupa pengatur tata air, perlindungan dan pengendali banjir, pengatur iklim mikro, mendukung kehidupan global sebagai penyerap karbon dan mengendalikan perubahan iklim, wahana penelitian dan pendidikan konservasi, siklus nutrisi dan mendukung kesehatan masyarakat.

Dengan fungsinya yang demikian besar maka 10 tahun ke depan, TNGGP sebagai perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa diharapkan tetap terjaga dan berfungsi sebagai system penyangga kehidupan.

2. Populasi owa jawa, macan tutul dan elang jawa dipertahankan

Pertimbangan populasi owa jawa, macan tutul dan elang jawa serta satwa liar lainnya perlu dipertahankan, selain karena mandat dari penetapan TNGGP, juga karena owa jawa, macan tutul dan elang jawa serta keanekaragaman hayati lainnya merupakan salah satu elemen penting dalam keseimbangan ekosistem. Satwa liar tersebut merupakan bagian dari rantai makanan, jika saja rantai makanan tersebut terganggu, maka akan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan berpengaruh besar pada kehidupan manusia.

3. TNGGP bermanfaat secara lestari untuk mendukung pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat

TNGGP memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi demikian juga jasa lingkungan baik masa dan energi air maupun objek dan daya Tarik wisata alam yang beragam berupa aneka curug, hamparan lansekap yang indah serta jalur pendakian yang sudah banyak dikenal masyarakat terutama para pendaki baik di Indonesia maupun mancanegara. Potensi yang dimiliki TNGGP ini dapat dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung pembangunan wilayah serta kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan posisi TNGGP sebagai zona inti Cagar Biosfir Cibodas yang diharapkan dapat menjadi pengungkit pembangunan wilayah di sekitar TNGGP.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN PENGELOLAAN

A. VISI

Visi yang ingin dicapai 10 (sepuluh) tahun ke depan dalam pengelolaan TNGGP adalah:

“Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan upaya-upaya yang harus ditempuh dan tertuang dalam misi pengelolaan TNGGP sebagai berikut:

1. Mempertahankan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan sebagai system penyangga kehidupan yang menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;
2. Mempertahankan populasi owa jawa, macan tutul dan elang jawa
3. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka cagar biosfer Cibodas untuk mendukung pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat.

C. TUJUAN PENGELOLAAN

Tujuan pengelolaan untuk mencapai visi dan misi pengelolaan TNGGP adalah sebagai berikut :

1. Memulihkan ekosistem yang rusak pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai system penyangga kehidupan
2. Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP

3. Terwujudnya sumberdaya manusia berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP
5. Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan satwa liar lainnya
6. Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati
7. Mewujudkan aktifitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan
8. Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman
9. Meningkatkan pemanfaatan air
10. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP

BAB III. ZONASI

A. LUAS ZONA

Zonasi TNGGP telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 356/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 dengan luas per Zona sebagaimana dalam Tabel 12.

Tabel 12. Luas Zonasi TNGGP

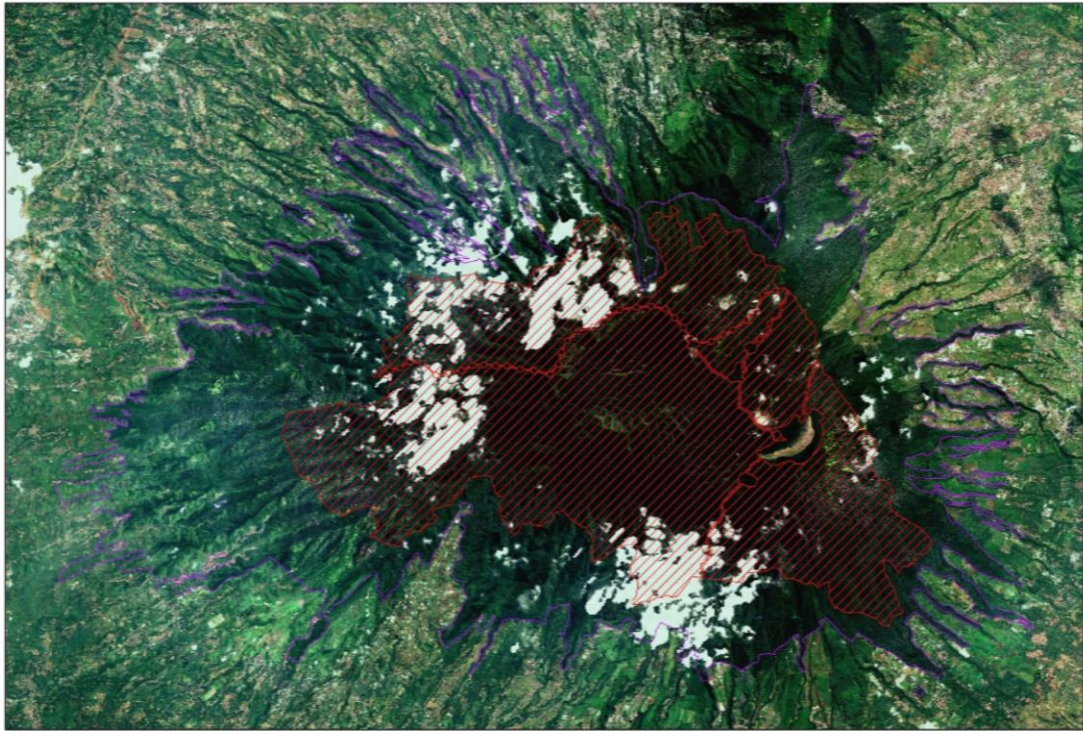
NO	ZONA	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Zona Inti / ZI	10.482,44	43.2
2	Zona Rimba / ZR	6.646,70	27.4
3	Zona Pemanfaatan / ZP	2.713,15	11.2
4	Zona Tradisional / ZTr	297,17	1.2
5	Zona Khusus / ZKh	23,67	0.1
6	Zona Rehabilitasi / ZR	4.115,72	17.0
	Total	24.278,85	100

B. DESKRIPSI MASING-MASING ZONA

1. Zona Inti

Kondisi Saat ini

Zona inti merupakan ciri khas baik biofisik dan keanekaragaman hayati dari suatu kawasan, memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi dan mutlak dilindungi dalam fungsinya untuk perlindungan dan pelestarian Taman. Kondisi zona inti TNGGP saat ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari google earth sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1 dimana tutupan hutan zona inti masih terlihat hijau kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.



Gambar 10. Zona Inti TNGGP

Potensi

Jenis flora yang terdapat di zona inti TNGGP yaitu, kimerak, kitanduk, pasang, kiracun, puspa, cantigi, janitri, rasamala, bareubeuy, riung anak dan kijeruk. Sedangkan jenis fauna yang terdapat di dalam zona inti adalah lutung, macan tutul, surili, owa jawa, elang jawa, mencek, dan burung sepah madu.

Permasalahan

Permasalahan di zona inti relatif kecil karena keberadaan zona inti ditengah TNGGP dan dikelilingi zona lainnya. Namun demikian, zona inti tidak terlepas dari permasalahan, yaitu:

1. Perburuan burung, cacing kalung dan cacing sonari yang mempunyai khasiat sebagai obat dan berharga mahal. Perburuan cacing sonari menjadi masalah karena cacing sonari hidup di ketinggian 2.200 m dpl dan hidup secara

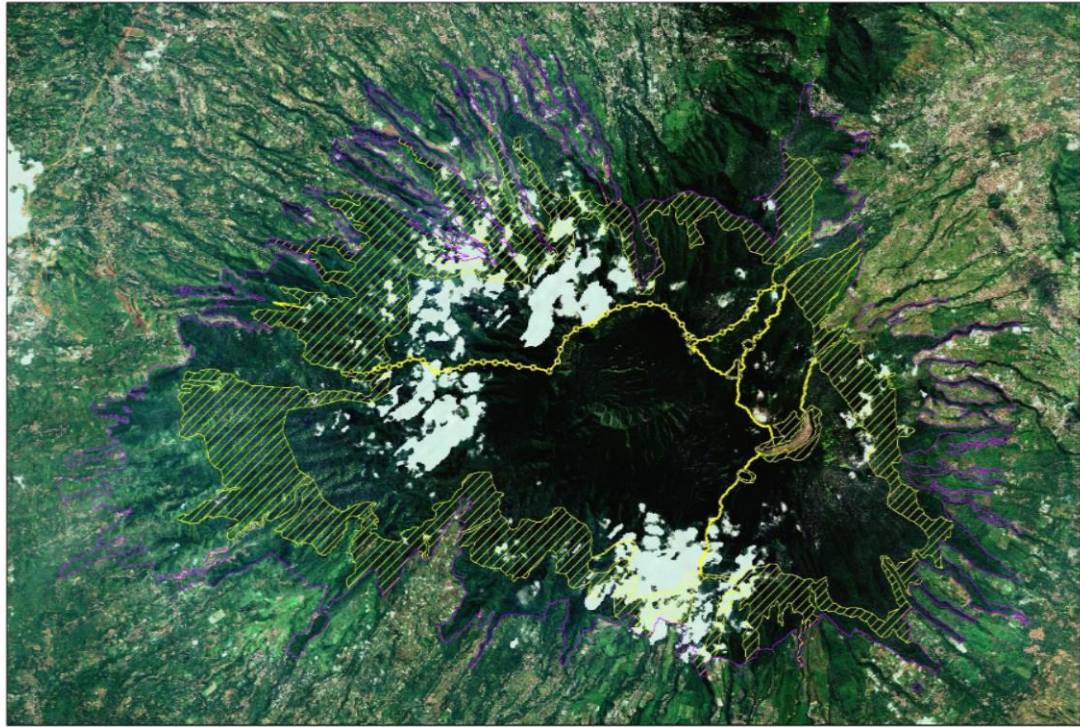
arboreal dalam akar kadaka. Kadaka ini tumbuh sebagai epipit dalam pohon, sehingga apabila masyarakat mengambil cacing sonari, pohon yang ditumbuhi kadaka tersebut ditebang;

2. Zona inti menjadi jalur ilegal pendakian, hal ini menjadi masalah karena pendaki sering meninggalkan sampah di sepanjang jalur pendakian. Selain itu, pendaki yang melalui jalur ilegal membahayakan diri sendiri karena kemungkinan terjadi kecelakaan / kesasar lebih besar dan menyulitkan pengelola dalam penanganannya;
3. Kegiatan kunjungan masyarakat baik ziarah maupun wisata yang sampai puncak dan membuka camp di alun alun baik surya kencana maupun mandalawangi adanya potensi masuknya tumbuhan asing atau dinamakan alien, hal lain juga aktifitas dimaksud apabila dilakukan pada musim kemarau juga membawa potensi kebakaran hutan karena adanya penggunaan api di dalam kawasan.

2. Zona Rimba

Kondisi Saai ini

Zone rimba pada dasarnya ditetapkan sebagai rembesan (refuge) dari sumber daya alam baik flora maupun fauna sekaligus juga berfungsi sebagai penyangga (buffer) zona inti terhadap kerusakan apabila terjadi dari zona pemanfaatan. Keberadaan zona rimba saat ini kondisinya relatif masih utuh dan dapat terlihat dari gambar 11.



Gambar 11. Zona Rimba TNGGP

Potensi

Potensi yang ada pada zona seperti *Altingia exelsa* dan *Castanopsis argentea*, pohon berukuran kecil/sedang (tinggi 10 m-20 m) seperti *Antidesma tetandrum* dan *Litsea* sp., dan pohon belukar/perdu (tinggi 3 m - 5 m) seperti *Ardisia fuliginosa* dan *Dichora febrifuga*. Pada tipe hutan ini paling umum dijumpai jenis-jenis tumbuhan anggota suku Fagaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae, dan Theaceae. Jenis tumbuhan dari suku Fagaceae dan Lauraceae sangat banyak ditemukan, sehingga hutan pegunungan bawah ini sering juga disebut sebagai hutan Laura-Fagaceae. Jenis-jenis satwa langka yang masih dapat dijumpai pada saat ini, antara lain primata, yaitu Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Surili (*Presbytis comata*), Lutung (*Trachypithecus auratus*) serta pemangsa seperti Macan Tutul (*Panthera pardus*), Kucing Hutan (*Felis bengalensis*), Kucing Akar (*Mustela flavigula*) dan Anjing Hutan (*Cuon alpinus javanicus*). Disamping itu terdapat pula jenis satwa lainnya seperti Sigung (*Mydaus*

javanensis), Kijang (*Muntiacus muntjak*) dan Kancil (*Tragulus javanicus*). Jenis burung (*Aves*) yang tercatat ditemukan di kawasan ini sebanyak 260 jenis (lebih dari 50% dari jenis burung yang hidup di Jawa), yang terdiri dari 19 jenis dari 21 jenis burung yang endemik Pulau Jawa (termasuk Bali), 58 jenis burung yang dilindungi, 2 jenis burung berstatus lumayan jarang dijumpai, 34 jenis burung berstatus jarang dijumpai, dan satu jenis yang sangat jarang dijumpai. Tiga jenis burung yang memiliki status endemik sekaligus jarang ditemukan dan dilindungi, yaitu: Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*), Celepuk Gunung (*Otus angelinae*), dan Cerecet (*Psaltria exilis*).

Permasalahan

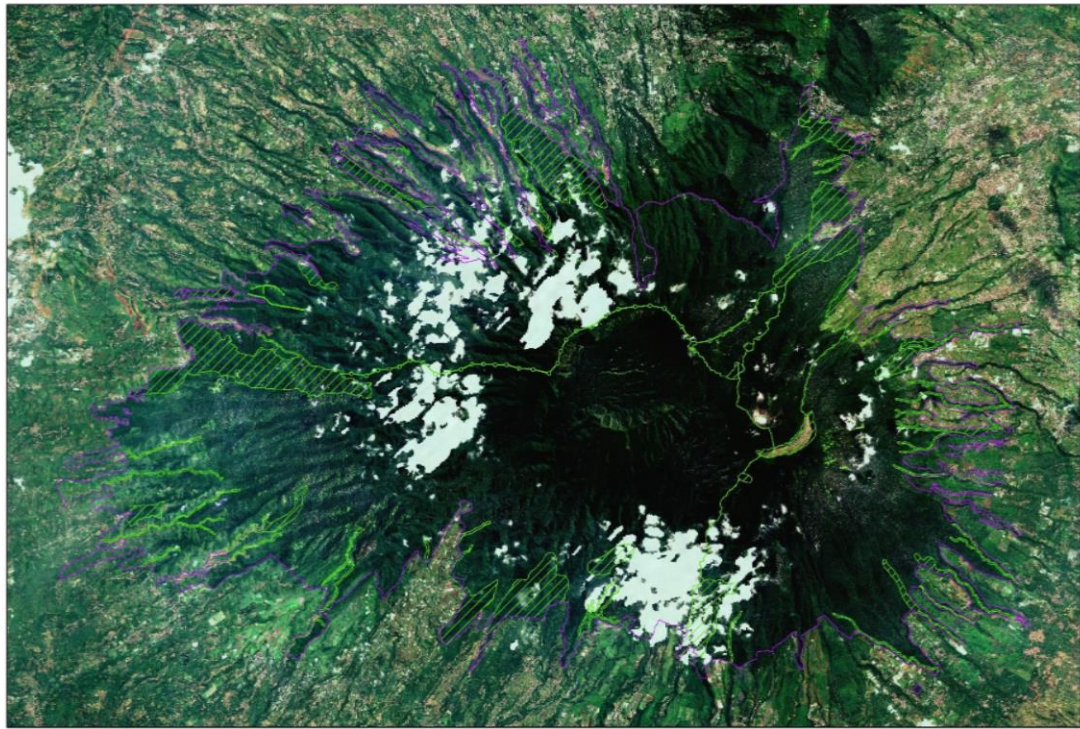
Permasalahan yang ada di zona rimba antara lain adalah:

1. Perburuan burung dan mamalia seperti mencek, babi hutan dan berbagai jenis burung;
2. Adanya jenis tumbuhan eksotik/*alien species* yang terdiri dari 7 jenis yang bersifat invasif (*Invasive Alien Species/IAS*) dan 28 jenis lainnya bersifat non invasif yang mulai tersebar tersebar pada ketinggian 1200 sampai dengan 2700 mdpl;
3. Terdapat lokasi zona rimba yang berbatasan langsung dengan apl sehingga rawan gangguan;
4. Pengambilan ilegal tanaman hias.

3. Zona Pemanfaatan

Kondisi Saat ini

Keberadaan zona Pemanfaatan di TNGGP yang merupakan sumber daya alam berupa landscape dan tipe ekosistem taman nasional yang dimanfaatkan dalam bentuk jasa lingkungan, berupa pariwisata alam, pendidikan konservasi alam/lingkungan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan menunjang budi daya, serta pemberian ruang untuk pemanfaatan masa dan energi air.



Gambar 12. Zona Pemanfaatan TNGGP

Potensi

Potensi objek dan daya Tarik wisata alam yang terinventarisir sebanyak 20 potensi air terjun (empat diantaranya sudah dikembangkan, yaitu Curug Ciwalen, Curug Cibeureum-Cibodas, Curug Sawyer dan Curug Cibeureum-Salabintana), air panas (satu lokasi yang sudah dikembangkan: Air Panas di jalur pendakian), tiga lokasi goa (satu goa yang sudah dimanfaatkan untuk tujuan spritual: Goa Gumuruh, yang lain dilindungi karena ekosistem goa sangat rapuh), tujuh lokasi potensi bumi perkemahan (enam lokasi sudah dikembangkan: Pondok Halimun Salabintana, Bobojong - Gunung Putri, Kandang Batu - Cibodas, Kandang Badak - Cibodas, Alun-alun Suryakencana - Cibodas, Mandalawangi - Cibodas), serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang potensial dikembangkan sebagai objek wisata alam dan kegiatan lainnya.

Permasalahan

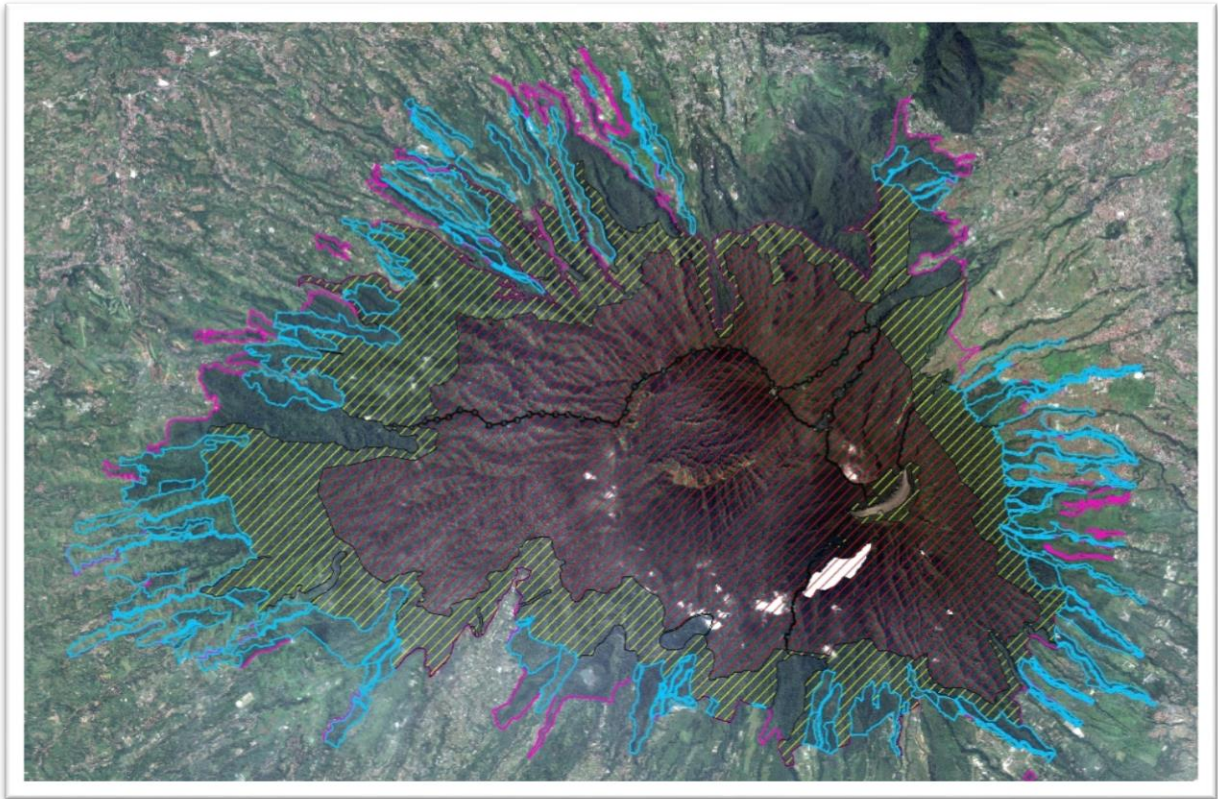
Permasalahan yang ada di zona pemanfaatan antara lain adalah:

1. Kegiatan wisata alam yang berkembang di resort Situgunung akhir-akhir ini Menuju ke wisata alam yang bersifat masal, dikhawatirkan melebihi daya dukung kawasan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian TNGGP karena tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan;
2. Aktivitas wisata alam yang menimbulkan sampah;
3. Belum seluruhnya lokasi zona pemanfaatan memiliki dokumen perencanaan yang lengkap (diasain tapak, masterplan, DED);
4. Perburuan burung dan mamalia seperti mencek dan babi hutan.

4. Zona Rehabilitasi

Kondisi Saat Ini

Hampir seluruh zona rehabilitasi berada di areal perluasan merupakan areal perubahan fungsi dari Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi terbatas tegakan yang ada di zona rehabilitasi merupakan hasil penanaman yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan didominasi pohon pinus dan damar sehingga diperlukan usaha untuk mengembalikan ke kondisi ekosistem alamiahnya TNGGP sehingga, pohon pinus dan damar ini merupakan jenis eksotik bagi TNGGP, perlunya dilakukan pemulihan ekosistem dengan menanam tanaman endemik (lokal TNGGP) secara bertahap, agar kawasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.



Gambar 13. Zona Rehabilitasi TNGGP

Potensi

Zona rehabilitasi berada pada areal perluasan yang semula berstatus Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas dan dikelola oleh Perum Perhutani dengan dominasi tumbuhan berupa hutan tanaman pinus, damar dan ekaliptus serta tamanam pagar kaliandra. Jenis-jenis pohon tersebut untuk TNGGP merupakan jenis eksotis sehingga untuk menjadikan kawasan tersebut sesuai dengan fungsinya saat ini sebagai kawasan TNGGP maka harus dilakukan upaya pemulihan ekosistem secara bertahap.

Permasalahan

Permasalahan yang ada di zona rehabilitasi antara lain adalah:

1. Sebagian besar zona rehabilitasi merupakan hutan tanaman pinus damar dan ekaliptus yang merupakan tumbuhan eksotis bagi TNGGP. Untuk melakukan upaya pemulihan ekosistem perlu dukungan regulasi yang memungkinkan penebangan pohon besar (pinus, damar dan ekaliptus) untuk diganti dengan tumbuhan asli TNGGP;

2. Masih adanya penggarapan kawasan oleh masyarakat pada lokasi pemulihan ekosistem, sehingga keberhasilan pemulihan ekosistem yang telah dilakukan kurang optimal;
3. Pada sebagian zona rehabilitasi masih ada penggarapan oleh masyarakat eks PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat);
4. Pada lokasi - lokasi tertentu terdapat tumbuhan asing yang invasif, sehingga perlu segera dikendalikan untuk mencegah penyebaran lebih luas;
5. Masih adanya pertanian lahan basah (sawah), sehingga untuk melakukan upaya pemulihan ekosistem perlu dilakukan secara bertahap;
6. Pada lokasi tertentu terdapat klaim status alas kawasan oleh sekelompok masyarakat;
7. Penggalian pasir dan batu untuk pembangunan rumah;
8. Masih dijumpainya penebangan kayu liar (ilegal);
9. Mayoritas zona rehabilitasi berbatasan langsung dengan batas luar kawasan, sehingga permasalahan yang sering terjadi yaitu mengenai batas luar kawasan atau pemantapan batas kawasan;
10. Perburuan burung dan mamalia seperti mencek dan babi hutan.

5. Zona Tradisional

Kondisi Saat Ini

Seluruh Zona Tradisional merupakan areal perluasan (eks Perum Perhutnani) yang merupakan hutan tanaman dengan jenis pohon pinus dan damar yang berumur $\pm 15 - 25$ tahun. Saat ini di sebagian zona tradisional (100 ha) telah di manfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk diambil getahnya melalui mekanisme pemberian akses pemungutan HHBK yang sudah dimanfaatkan masyarakat secara turun temurun.

Potensi

Keberadaan zona tradisional diperuntukkan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan secara tradisional dan turun temurun. Potensi yang ada di zona tradisional berupa hutan

tanaman pinus, damar dan jenis-jenis lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahan baku kerajinan atau Hasil Hutan Non Kayu lainnya.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di zona tradisional adalah:

1. Zona tersebut terdapat kegiatan masyarakat, sehingga potensi masuknya tumbuhan asing dari sisa makanan sangat besar;
2. Belum semua zona tradisional tersebut di inventarisir potensi yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat secara tradisional;
3. Belum seluruhnya lokasi zona tradisional di beri tanda khusus, pal batas fungsi.

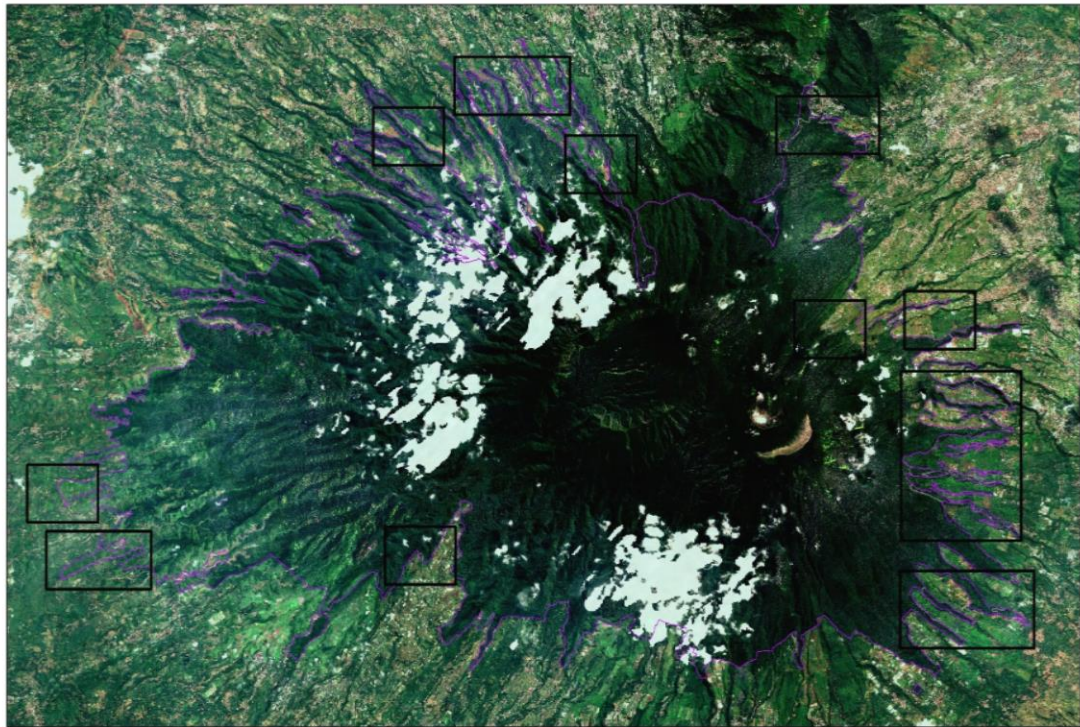
6. Zona Khusus

Kondisi Saat ini

Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat sarana - prasarana di taman nasional berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi / jalan batu, makam, dan listrik.

Potensi

Keberadaan Zona Khusus pada zonasi TNGGP merupakan zona / lokasi yang terdapat Fasilitas public dan pembangunan sarana yang tidak dapat dihindarkan untuk kepentingan masyarakat secara luas baik tingkat kabupaten maupun nasional sebelum ditunjuk / ditetapkan sebagai taman nasional sebagai sarana penunjang kehidupan masyarakat. Sarana tersebut berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, jalan antara kawasan dan perkebunan juga yang menghubungkan kampung ke kampung, serta pemakaman umum warga.



Gambar 14. Zona khusus TNGGP

Permasalahan

Permasalahan yang ada di zona khusus antara lain adalah:

1. Belum adanya pengaturan mengenai penggunaan jalan, siapa yang harus melakukan pemeliharaan terhadap sarana yang dimaksud;
2. Belum adanya kesepakatan maupun pengaturan mengenai penggunaan makam umum oleh masyarakat, sehingga potensi untuk menambah luas itu sangat dimungkinkan;
3. Dengan adanya akses jalan menjadikan potensi gangguan keamanan semakin terbuka.

BAB IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI

A. STRATEGI

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan adalah :

- | | | |
|----------|---|--|
| Tujuan 1 | : | Memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai sistem penyangga kehidupan. |
| Strategi | : | Mengintensifkan upaya - upaya pemulihan ekosistem bersama mitra |
| Tujuan 2 | : | Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP. |
| Strategi | : | Mengintensifkan upaya - upaya perlindungan dan pengamanan bersama masyarakat |
| Tujuan 3 | : | Terwujudnya sumberdaya manusia berwawasan lingkungan. |
| Strategi | : | Integrasi seluruh aspek pengelolaan dengan konsep pendidikan konservasi |
| Tujuan 4 | : | Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP serta berkelanjutan. |
| Strategi | : | Mengintensifkan upaya - upaya penyadartahuan masyarakat dan pendampingan pengembangan usaha alternative ekonomi lainnya |
| Tujuan 5 | : | Meningkatkan upaya - upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa, dan satwa liar lainnya. |
| Strategi | : | Meningkatkan upaya - upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan, satwa liar lainnya bersama mitra |
| Tujuan 6 | : | Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati. |
| Strategi | : | Mengintensifkan upaya - upaya monitoring dan penguatan database keanekaragaman hayati bersama mitra |
| Tujuan 7 | : | Mewujudkan aktifitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan. |
| Strategi | : | Mengembangkan wisata alam dengan standar pengelolaan internasional bersama masyarakat |
| Tujuan 8 | : | Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan, nyaman |
| Strategi | : | Menerapkan pelayanan prima bertaraf internasional (ISO 9001) dan penyadartahuan pendakian |

- Tujuan 9 : Meningkatkan pemanfaatan air.
Strategi : Memastikan Pemanfaatan air berkelanjutan untuk mendukung penghidupan masyarakat desa penyangga
- Tujuan 10 : Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP.
Strategi : Mengoptimalkan pemanfaatan Kehati sebagai sumber plasmanutfah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

B. RENCANA AKSI

Rencana aksi yang akan dilakukan sepuluh tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan adalah :

Tujuan 1: Memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai sistem penyangga kehidupan

Rencana Aksi:

1. Pemulihan ekosistem
2. Monitoring debit air

Tujuan 2 : Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP

Rencana Aksi :

1. Perlindungan dan pengaman kawasan

Tujuan 3 : Terwujudnya sumberdaya manusia berwawasan lingkungan

Rencana Aksi:

1. Menyusun SOP pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi
2. Pengembangan jejaring kerja dan kelompok pembelajar
3. Membina masyarakat menjadi Intepreter profesional
4. Pendidikan Konservasi dan Lingkungan (DIKOLING)
5. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan konservasi

Tujuan 4 : Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP

Rencana Aksi :

1. Penyuluhan
2. Peningkatan kapasitas masyarakat
3. Membentuk Kader Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

4. Pengembangan daerah penyangga dengan materi keanekaragaman hayati TNGGP

Tujuan 5 : Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan, satwa liar lainnya

Rencana Aksi:

1. Monitoring populasi macan tutul, owa jawa, surili dan, elang jawa
2. Monitoring habitat macan tutul, owa jawa, surili dan, elang jawa
3. Monitoring kecukupan satwa mangsa macan tutul, owa jawa, surili dan, elang jawa
4. Pembinaan habitat macan tutul, owa jawa, surili dan, elang jawa
5. Membangun dan mengelola sanctuary Elang Jawa
6. Mengelola 1 unit sanctuary Owa Jawa

Tujuan 6 : Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati

Rencana Aksi:

1. Pemetaan potensi keanekaragaman hayati
2. Pembaharuan data keanekaragaman hayati
3. Membangun jejaring kerja dan kemitraan penelitian
4. Peningkatan kapasitas SDM dalam monitoring keanekaragaman hayati

Tujuan 7 : Mewujudkan aktifitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan

Rencana Aksi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan wisata alam
2. Melakukan kajian daya dukung
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Wisata Alam yang ramah pada penyandang disabilitas
4. Pembinaan masyarakat pendukung wisata alam
5. Penerapan ISO 14001-2015
6. Promosi dan penyadartahuan masyarakat

Tujuan 8 : Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan, nyaman

Rencana Aksi:

1. Meningkatkan system pelayanan
2. Meningkatkan keamanan pendakian
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendakian berstandar internasional dan ramah pada penyandang disabilitas
4. Penegakan hukum terhadap pendaki illegal
5. Meningkatkan penyadartahuan pendaki terkait sampah

Tujuan 9 : Meningkatkan pemanfaatan air

Rencana Aksi:

1. Sosialisasi pemanfaatan air
2. Pembentukan dan pembinaan kelembagaan pemanfaatan air

Tujuan 10 : Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP

Rencana Aksi:

1. Menjalin kerjasama penelitian terkait pemanfaatan 2 jenis kehati untuk kesejahteraan masyarakat
2. Demplot penangkaran dan pemanfaatan 2 jenis kehati untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kerjasama pemanfaatan HHBK di Zona Tradisional

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara Visi, Misi, Strategi dan Rencana Aksi dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Pengelolaan, Strategi Dan Rencana Aksi

VISI: "Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk mendukung pembangunan wilayah dan Masyarakat"

MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN TUJUAN PENGELOLAAN	STRATEGI	RENCANA AKSI
1. Mempertahankan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan sebagai system penyangga kehidupan yang menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;	1. Memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai system penyangga kehidupan	1. Sepuluh Tahun kedepan, 2.000 ha kawasan yang mengalami kerusakan di areal perluasan, pulih ekosistemnya	Mengintensifkan upaya-upaya pemulihan ekosistem bersama mitra	Pemulihan Ekosistem
		2. Sepuluh tahun ke depan, debit air di 96 areal pemanfaatan air yang telah ditetapkan stabil		Monitoring debit air
	2. Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP		Mengintensifkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan	Perlindungan dan pengaman kawasan

MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN TUJUAN PENGELOLAAN	STRATEGI	RENCANA AKSI
			bersama masyarakat	
	3. Terwujudnya sumberdaya manusia berwawasan lingkungan	1. Sepuluh tahun kedepan, seluruh aspek pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi	Integrasi seluruh aspek pengelolaan dengan konsep pendidikan konservasi	Menyusun SOP pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi
		2. Sepuluh tahun ke depan, masyarakat di 65 Desa penyangga berwawasan konservasi dan lingkungan		1. Pengembangan jejaring kerja dan kelompok pembelajar
				2. Membina masyarakat menjadi Intepreter profesional
				3. Pendidikan Konservasi dan Lingkungan (DIKOLING)
	4. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan konservasi			
4. Terwujudnya peran dan kesadaran	1. Sepuluh tahun kedepan, masyarakat di	Mengintensifkan upaya-upaya penyadartahuan	1. Penyuluhan	

MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN TUJUAN PENGELOLAAN	STRATEGI	RENCANA AKSI
	masyarakat dalam pengelolaan TNGGP	65 Desa penyangga menyadari arti penting TNGGP	masyarakat dan pendampingan pengembangan usaha alternative ekonomi lainnya	
		2. Sepuluh tahun kedepan, masyarakat di 65 desa penyangga TNGGP terampil dalam pengembangan usaha alternatif ekonomi		3. Peningkatan kapasitas masyarakat
		4. Sepuluh tahun kedepan, masyarakat di 65 desa penyangga TNGGP memiliki sikap mandiri secara ekonomi dan turut serta dalam menjaga kelestarian TNGGP		5. Membentuk Kader Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
		5. Sepuluh tahun ke depan, 2 desa penyangga dikembangkan dengan materi kehati TNGGP		Pengembangan daerah penyangga dengan materi kehati TNGGP
2. Mempertahankan populasi owa jawa, macan tutul dan elang jawa	1. Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan satwa liar lainnya	Sepuluh tahun ke depan, populasi owa jawa, macan tutul dan elang jawa minimal sama dengan saat ini (baseline)	Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan satwa liar lainnya bersama mitra	Monitoring populasi macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa
				Monitoring habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa
				Monitoring kecukupan satwa mangsa macan tutul, owa jawa,

MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN TUJUAN PENGELOLAAN	STRATEGI	RENCANA AKSI
				surili dan elang jawa
				Pembinaan habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa
				Membangun dan mengelola sanctuary Elang Jawa
				Mengelola 1 unit sanctuary Owa Jawa
	2. Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati	Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati TNGGP	Mengintensifkan upaya-upaya monitoring dan penguatan database keanekaragaman hayati bersama mitra	Pemetaan potensi keanekaragaman hayati
				Updating data keanekaragaman hayati
				Membangun jejaring kerja dan kemitraan penelitian
				Peningkatan kapasitas SDM dalam monitoring keanekaragaman hayati
	3. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka cagar biosfer Cibodas untuk mendukung pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat	1. Mewujudkan aktifitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan	Sepuluh tahun kedepan, penyelenggaraan wisata alam di 15 ODTWA sesuai dengan perencanaan, daya dukung kawasan, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan masyarakat pendukung wisata yang professional, pengunjung yang sadar lingkungan	Mengembangkan wisata alam dengan standar pengelolaan internasional bersama masyarakat
				1. Penyusunan dokumen perencanaan wisata alam
				2. Melakukan kajian daya dukung
				3. Pengadaan Sarana Prasarana Wisata Alam yang ramah pada penyandang difabel
				4. Pembinaan masyarakat

MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN TUJUAN PENGELOLAAN	STRATEGI	RENCANA AKSI
		serta telah menerapkan sistem manajemen lingkungan		pendukung wisata alam
				5. Penerapan ISO 14001-2015
				6. Promosi dan penyadartahuan masyarakat
	2. Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman	Sepuluh tahun ke depan, pendakian di TNGGP zero accident dan zero waste	Menerapkan pelayanan prima bertaraf internasional (ISO 9001) dan penyadartahuan pendakian	Penyempurnaan system pelayanan
				Penyempurnaan SOP keamanan pendakian
				Pengadaan sarpras pendakian berstandar internasional dan ramah pada penyandang difabel
				Penegakan hukum terhadap pendaki illegal
	3. Meningkatkan pemanfaatan air	Sepuluh tahun kedepan, pemanfaatan air non komersial meningkat 25 % dari baseline	Memastikan Pemanfaatan air berkelanjutan untuk mendukung penghidupan masyarakat desa penyangga	Sosialisasi pemanfaatan air
				Pembentukan dan pembinaan kelembagaan pemanfaatan air
	4. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP	Sepuluh tahun kedepan, 2 jenis keanekaragaman hayati TNGGP dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat	Mengoptimalkan pemanfaatan Kehati sebagai sumber plasma nutfah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menjalin kerjasama penelitian terkait pemanfaatan 2 jenis kehati untuk kesejahteraan masyarakat
				Pembuatan Demplot penangkaran dan pemanfaatan 2

MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN TUJUAN PENGELOLAAN	STRATEGI	RENCANA AKSI
				jenis kehati untuk kesejahteraan masyarakat
				Kerjasama pemanfaatan HHBK dengan masyarakat di Zona Tradisional

BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi keberhasilan pencapaian Rencana Pengelolaan TNGGP dilakukan melalui pencapaian indikator keberhasilan baik indikator keberhasilan tujuan maupun indikator keberhasilan rencana aksi. Indikator keberhasilan tujuan pengelolaan dan indikator keberhasilan rencana aksi dapat dilihat pada Tabel 14 dan Tabel 15.

Tabel 14. Indikator keberhasilan Tujuan Pengelolaan

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan
1	Memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai sistem penyangga kehidupan	1. Sepuluh Tahun kedepan, 2.000 ha kawasan yang mengalami kerusakan di areal perluasan, akan pulih ekosistemnya
		2. Sepuluh tahun ke depan, debit air di 94 areal pemanfaatan air yang telah ditetapkan akan stabil
2	Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP	Sepuluh tahun kedepan, gangguan terhadap kawasan TNGGP seluas 24.270,80 ha terkendali
3	Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP	1. Sepuluh tahun kedepan, seluruh aspek pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi
		2. Sepuluh tahun ke depan, masyarakat di 65 Desa penyangga berwawasan konservasi dan lingkungan
4	Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP	1. Sepuluh tahun kedepan, masyarakat di 65 Desa penyangga menyadari arti penting TNGGP
		2. Sepuluh tahun kedepan, masyarakat di 65 desa penyangga TNGGP terampil dalam pengembangan usaha alternatif ekonomi
		3. Sepuluh tahun kedepan, masyarakat di 65 desa penyangga TNGGP memiliki sikap mandiri secara ekonomi dan turut serta dalam menjaga kelestarian TNGGP
		4. Sepuluh tahun ke depan, 2 desa penyangga dikembangkan dengan materi kehati TNGGP
5	Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan satwa liar lainnya	Sepuluh tahun ke depan, populasi owa jawa, macan tutul dan elang jawa minimal sama dengan saat ini (baseline)
6	Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati	Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati TNGGP
7	Mewujudkan aktifitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan	Sepuluh tahun kedepan, penyelenggaraan wisata alam di 15 ODTWA sesuai dengan perencanaan, daya dukung kawasan, didukung dengan

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan
		sarana dan prasarana yang memadai dan masyarakat pendukung wisata yang professional, pengunjung yang sadar lingkungan serta telah menerapkan sistem manajemen lingkungan
8	Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman	Sepuluh tahun ke depan, pendakian di TNGGP zero accident dan zero waste
9	Meningkatkan pemanfaatan air	Sepuluh tahun kedepan, pemanfaatan air non komersial meningkat 25 % dari baseline
10	Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP	Sepuluh tahun kedepan, 2 jenis keanekaragaman hayati TNGGP dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat

Tabel 15. Indikator Keberhasilan Rencana Aksi

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN	Pihak yang terlibat	Lokasi
1	Pemulihan Ekosistem	Terpulihkannya ekosistem kawasan yang terindikasi rusak seluas 2.000 Ha	BBTNGGP/Mitra TNGGP/ BPDAS/ masyarakat	15 resort
		Terkendalikannya 7 Jenis asing invasive	BBTNGGP/Mitra TNGGP/	15 Resort
		Termonitutor 35 sebaran dan populasi jenis asing dalam kawasan	BBTNGGP/Mitra TNGGP/ perguruan tinggi/ lembaga penelitian	15 Resort
2	Monitoring debit air	Termonitornya debit air di 94 lokasi pemanfaatan air setiap tahun	BBTNGGP/Perguruan tinggi/ Pemda/ mitra	15 resort
3	Perlindungan dan pengaman kawasan	Tersosialisasikannya fungsi TNGGP terhadap masyarakat 65 desa penyangga	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ Pemda	15 resort
		Terbentuknya masyarakat mitra polhut 200 orang	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ Pemda	BBTNGGP
		Terlaksananya penanganan TIPIHUT 1 kasus per tahun	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ Pemda/APH	15 resort
		Terbinanya masyarakat di 65 Desa Penyangga	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ Pemda/APH	BBTNGGP
		Terlaksananya Patroli di 15 Resort Pengelolaan TN	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ Pemda/APH	15 resort
		Terlaksananya penjagaan di 15 Resort Pengelolaan TN	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ Pemda/APH	15 resort, 3 Bidwil dan Balai
		Terlaksananya Anjungsana ke 65 Desa Penyangga	BBTNGGP/Mitra	15 resort
		Terlaksananya koordinasi, konsultasi, pulbaket, dll di 65 Desa Penyangga, 18 Kecamatan dan 3 Kabupaten serta 1 Provinsi	BBTNGGP /APH/ Pemda	15 resort
		Terlaksananya pembinaan 120 orang MPA selama 10 tahun	BBTNGGP/Lembaga yang membidangi kebakaran	BBTNGGP
		Tidak terjadinya kebakaran hutan		

No	RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN	Pihak yang terlibat	Lokasi
		Terlaksananya Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran Hutan (SPBK)	BBTNGGP/Lembaga yang membidangi kebakaran	15 resort
		Terpenuhinya standar minimal alat kebakaran hutan di 15 resort	BBTNGGP/Lembaga yang membidangi kebakaran	
		Terlaksananya koordinasi dengan instansi daerah yang membidangi kebakaran	BBTNGGP/Lembaga yang membidangi kebakaran	
		Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan teknis dan managerial pengendalian kebakaran hutan (20 orang)	BBTNGGP/Lembaga yang membidangi kebakaran	
4	Menyusun SOP pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi	Tersedianya 3 SOP pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi	BBNTGGP/ Mita TNGGP	
5	Pengembangan jejaring kerja dan kelompok pembelajar	Terbentuknya jejaring kerja dan kelompok pembelajar pendidikan konservasi sebanyak 10 kelompok	BBNTGGP	15 resort
6	Membina masyarakat menjadi Interpreter profesional	Tersedianya interpreter professional sebanyak 100 orang	BBTNGGP	6 kth dan selanjutnya 15 resort
7	Pendidikan Konservasi dan Lingkungan (DIKOLING)	Terlaksananya Perpustakaan Konservasi Keliling (PUSKOLING) 12 kali per tahun	BBTNGGP dan mitra	Sekolah di sekitar TNGGP
		Terlaksananya 'Visit to school' 6 kali per tahun	BBTNGGP dan mitra	Sekolah di sekitar TNGGP
		Terlaksananya School visit 6 kali pertahun	BBTNGGP dan mitra	Sekolah di sekitar TNGGP
		Terlaksananya visit to pesantren 6 kali pertahun	BBTNGGP dan mitra	Sekolah di sekitar TNGGP
		Terlaksananya 'Goes to Campus' 6 kali pertahun	BBTNGGP dan mitra	Sekolah di sekitar TNGGP
		Terlaksananya program sekolah binaan di 4 sekolah binaan di 3 bidang wilayah	BBTNGGP dan mitra	Sekolah di sekitar TNGGP
		Terlaksananya Kemah Konservasi (KEMKON) 3 kali pertahun	BBTNGGP dan mitra	Sekolah di sekitar TNGGP
		Terlaksananya seminar DIKOLING 1 kali pertahun	BBTNGGP dan mitra	BBTNGGP
		Terlaksananya program 'PEH Talk' dan 'PEH Clinic' 6 kali pertahun	BBTNGGP dan mitra	
		Terlaksananya pembinaan Saka Wana Bakti 1 kali pertahun	BBTNGGP dan mitra	BBTNGGP
		Terlaksananya Latihan dan Kunjungan (LAKU) 1x 4 kali pertahun	BBTNGGP dan mitra	
		Terlaksananya sosialisasi 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) 3 kali pertahun	BBTNGGP dan mitra	Sekolah dan desa sekitar kawasan

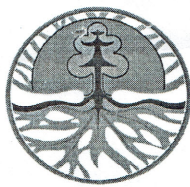
No	RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN	Pihak yang terlibat	Lokasi
8	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan konservasi	Tersedianya visitor center dengan sarana prasarana pendidikan konservasi berkelas dunia 4 unit	BBNTGGP/ Mita TNGGP	visitor cente di 15 ODTWA
		Tersedianya kendaraan DIKOLING 4 unit		
9	Penyuluhan	Masyarakat di 65 Desa Penyangga memiliki kesadartahuan tentang arti penting TNGGP	BBTNGGP/lembaga sertifikasi	15 resort
10	Peningkatan kapasitas masyarakat	36 Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan BBTNGGP memiliki keterampilan usaha alternatif ekonomi lainnya	BBRNTTGGP/ Mitra	15 resort
11	Membentuk Kader Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	Terbentuknya Penyuluh Kehutanan Sawadaya Masyarakat sebanyak 12 orang	BBTNGGP dan mitra	15 resort
12	Pengembangan daerah penyangga dengan materi kehati TNGGP	Terbentuknya Desa Hoya dan Desa Canar (anggur Bogor)	BBTNGGP/mitra	Bodogol
13	Monitoring populasi macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa	Tersedianya data populasi macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa di 10 site monitoring	BBTNGGP/Mitra TNGGP/ Perguruan Tinggi/ NGO	3 dan 7 site tambahan
14	Monitoring habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa	Tersedianya data habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa di 10 site monitoring	BBTNGGP/Mitra TNGGP/ Perguruan Tinggi/ NGO	3 dan 7 site tambahan
15	Monitoring kecukupan satwa mangsa macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa	Tersedianya data kecukupan satwa mangsa macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa di 10 site monitoring	BBTNGGP/Mitra TNGGP/ Perguruan Tinggi/ NGO	3 dan 7 site tambahan
16	Pembinaan habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa	Terlaksananya pembinaan habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa Di 10 site monitoring	BBTNGGP/ APH/ MMP/Pemda	15 Resoert lingkup TNGGP
17	Membangun dan mengelola sanctuary Elang Jawa	Terbangunnya 1 unit sanctuary Elang Jawa	BBTNGGP/Mitra TNGGP/ Perguruan Tinggi/ NGO	Pasir datar
18	Mengelola 1 unit sanctuary Owa Jawa	Meningkatnya pengelolaan 1 unit sanctuary Owa Jawa	BBTNGGP/Mitra TNGGP/ Perguruan Tinggi/ NGO	Bodogol
19	Pemetaan potensi keanekaragaman hayati	Terpetakan potensi kehati termasuk tanaman obat dengan data-data yang valid	BBNTGGP/ Mita TNGGP	10 lokasi
20	Updating data keanekaragaman hayati	Tersedianya Data kehati update yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan	BBNTGGP	15 lokasi
21	Membangun jejaring kerja dan kemitraan penelitian	BBNTGGP/perguruan tinggi/lipi/pemda	BBTNGGP	15 lokas

No	RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN	Pihak yang terlibat	Lokasi
22	Peningkatan kapasitas SDM dalam monitoring keanekaragaman hayati	Meningkatnya 50 orang SDM dalam rangka monitoring keanekaragaman hayati	BBNTGGP/ Mita TNGGP	
23	Penyusunan dokumen perencanaan wisata alam	Tersedianya dokumen Desain Tapak, Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) 15 objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA)	BBTNGGP/MITRA	3 jalur
24	Melakukan kajian daya dukung	tersedianya kajian daya dukung 15 objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA)	BBTNGGP/mitra /Pemda/LSM/perguruan tinggi	3 jalur dan 15 resort
25	Pengadaan Sarana Prasarana Wisata Alam yang ramah pada penyandang difabel	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana wisata alam di 15 ODTWA	BBTNGGP/ Pemda/NGO/LSM	3 kab dan 1 prov
26	Pembinaan masyarakat pendukung wisata alam	Meningkatnya kualitas dan kuantitas masyarakat pendukung wisata alam di 15 ODTWA	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi	10 resort dan satu resort pertahun
27	Penerapan ISO 14001-2015	Telah diterapkannya Sistem Manajemen Lingkungan di 15 ODTWA	BBTNGGP/ mitra	BBTNGGP
28	Promosi dan penyadartahuan masyarakat	Jumlah kunjungan wisata meningkat 20 % pertahun	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ Lipi/ kelompok masyarakat	BBTNGGP
29		150.000 Pengunjung wisata alam per tahun sadar lingkungan	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ Lipi/ kelompok masyarakat/ mitra	BBTNGGP
30	Penyempurnaan system pelayanan	Terciptanya pelayanan pendakian yang tidak menggunakan kertas	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ Lipi	BBTNGGP
31	Penyempurnaan SOP keamanan pendakian	Terwujudnya pendakian yang nol kecelakaan	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ penggiat alam bebas	BBTNGGP
32	Pengadaan sarpras pendakian berstandar internasional dan ramah pada penyandang difabel	Terpenuhinya sarana prasarana pendakian yang berstandar internasional	BBTNGGP/mitra	3 pintu pendakian
33	Penegakan hukum terhadap pendaki ilegal	Tidak ditemukan lagi pendaki ilegal	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ APH/ Pemda	15 resort
34	Penyadartahuan pendaki terkait sampah	Pendaki tidak meninggalkan sampah di sepanjang jalur pendakian (zero waste)	BBTNGGP/LSM/Perguruan tinggi/ APH/ Pemda	
35	Sosialisasi pemanfaatan air	Tersosialisasikannya pemanfaatan air kepada 65 Desa penyangga	BBTNGGP/ mitra	15 Resort
36	Pembentukan dan pembinaan kelembagaan pemanfaatan air	Terbentuk dan terbinanya 30 lembaga pemanfaatan air	BBTNGGP/ mitra	15 Resort
37	Menjalin kerjasama penelitian terkait	Terjalannya kerjasama penelitian pemanfaatan 2 jenis	BBTNGGP/ mitra	Kantor Balai

No	RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN	Pihak yang terlibat	Lokasi
	pemanfaatan 2 jenis kehati untuk kesejahteraan masyarakat	keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat		
38	Pembuatan Demplot penangkaran dan pemanfaatan 2 jenis kehati untuk kesejahteraan masyarakat	Tersedianya demplot penangkaran dan pemanfaatan 2 jenis kehati	BBTNGGP/ mitra	Kantor Balai/bidang
39	Kerjasama pemanfaatan HHBK di Zona Tradisional	Terlaksananya pemanfaatan HHBK dengan masyarakat di Zona Tradisional seluas 297,17ha	BBTNGGP/ mitra	Zona Tradisional

Estimasi kebutuhan anggaran RPJP TNGGP Tahun 2019 – 2028 dan tata waktu pelaksanaan dapat dilihat pada Lampiran

Lampiran - Lampiran



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto, Telp. (021) 5720229, JAKARTA

28 Mei 2019

Nomor : S. 178/KK/PPKK.1/KSA.1/5/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen Pengesahan RPJP
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Kepada Yth.

**Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
di Cianjur**

Berkenaan telah disahkannya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.179/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019 tanggal 9 Mei 2019, bersama ini disampaikan dokumen dimaksud untuk Saudara pergunakan sebagai dasar dalam pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Sebagai tindaklanjutnya, Saudara diminta untuk :

1. Menyampaikan dokumen RPJP dimaksud kepada para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal KSDAE dimaksud;
2. Menyampaikan dokumen final beserta *softfile*-nya (pdf dan *word*) kepada Direktorat Kawasan Konservasi pada kesempatan pertama;
3. Melakukan sosialisasi kepada para pihak yang terkait dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
4. Menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berpedoman pada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, yang dapat diunduh melalui link <http://ksdae.menlhk.go.id/info/2736/pedoman-penyusunan-rp-pada-ksa,-kpa-dan-tb.html>.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur,

Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum
NIP. 19690802 199803 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE; dan
3. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

A:_Seksi Perencanaan KSA TB\RPJP\Surat Pengantar\Dir KK_Kabalai BBTNGGP_Pengantar Pengesahan RPJP.docx



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 179/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO,
KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN SUKABUMI DAN KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT, PERIODE 2019-2028

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 24.270,80 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dan delapan puluh perseratus) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf c, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa perencanaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dikelola dengan rencana pengelolaan dan disusun oleh unit pengelola dan rencana pengelolaan disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Direktur Teknis, rencana pengelolaan jangka panjang dilakukan pengesahan oleh Direktur Jenderal;
 - d. bahwa Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sesuai surat nomor S.383/BBTNGGP/Bidtek/Tek.P3/01/2019 tanggal 2 April 2019, untuk mohon pengesahan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Periode 2019-2028.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - 3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO, KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN SUKABUMI DAN KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT, PERIODE 2019-2028.
- KESATU** : Mengesahkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Periode 2019-2028.
- KEDUA** : Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk mempedomani dan menindaklanjuti keputusan ini sebagai dasar dalam mengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 9 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL,



Ir. WIRATNO, M.Sc

NIP. 19620328 198903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Bupati Bogor;
5. Bupati Sukabumi;
6. Bupati Cianjur;
7. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
8. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : 174 /Kpts-II/2003.

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN CAGAR ALAM,
TAMAN WISATA ALAM, HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI
TERBATAS PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG GEDE PANGRANGO
SELUAS $\pm$ 21.975 (DUA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH
PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI JAWA BARAT MENJADI TAMAN
NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO.**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan lahan dengan tujuan lain yang terletak disekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mempunyai topografi yang curam, merupakan habitat dan daerah jelajah beberapa jenis satwa langka dan dilindungi seperti Surili, Owajawa, Macan tutul dan berbagai jenis burung yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sekaligus merubah fungsi kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango seluas $\pm$ 21.975 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992;
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
 - 5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990
jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990
jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001.

Memperhatikan : a. Nota Dinas Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam kepada Menteri Kehutanan No. 325/DJ-IV/KK/2003 tanggal 26 Maret 2003 perihal perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

b. Hasil pembahasan rencana perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimunan-Saiak yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan bersama Perum Perhutani, Pemda Provinsi Jawa Barat dan Banten, Pemda Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Lebak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan merubah fungsi kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas pada kelompok hutan Gunung Gede Pangrango seluas $\pm$ 21.975 (Dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar yang terletak di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

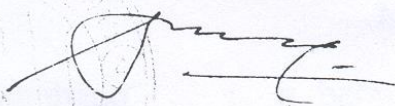
KEDUA : Batas Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana dimaksud amar PERTAMA adalah sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan ini, sedangkan batas dan luas definitif akan ditentukan kemudian setelah diadakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk mengatur pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam areal perluasan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 10 Juni 2003.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ir. SUYONO
NIP. 080035380

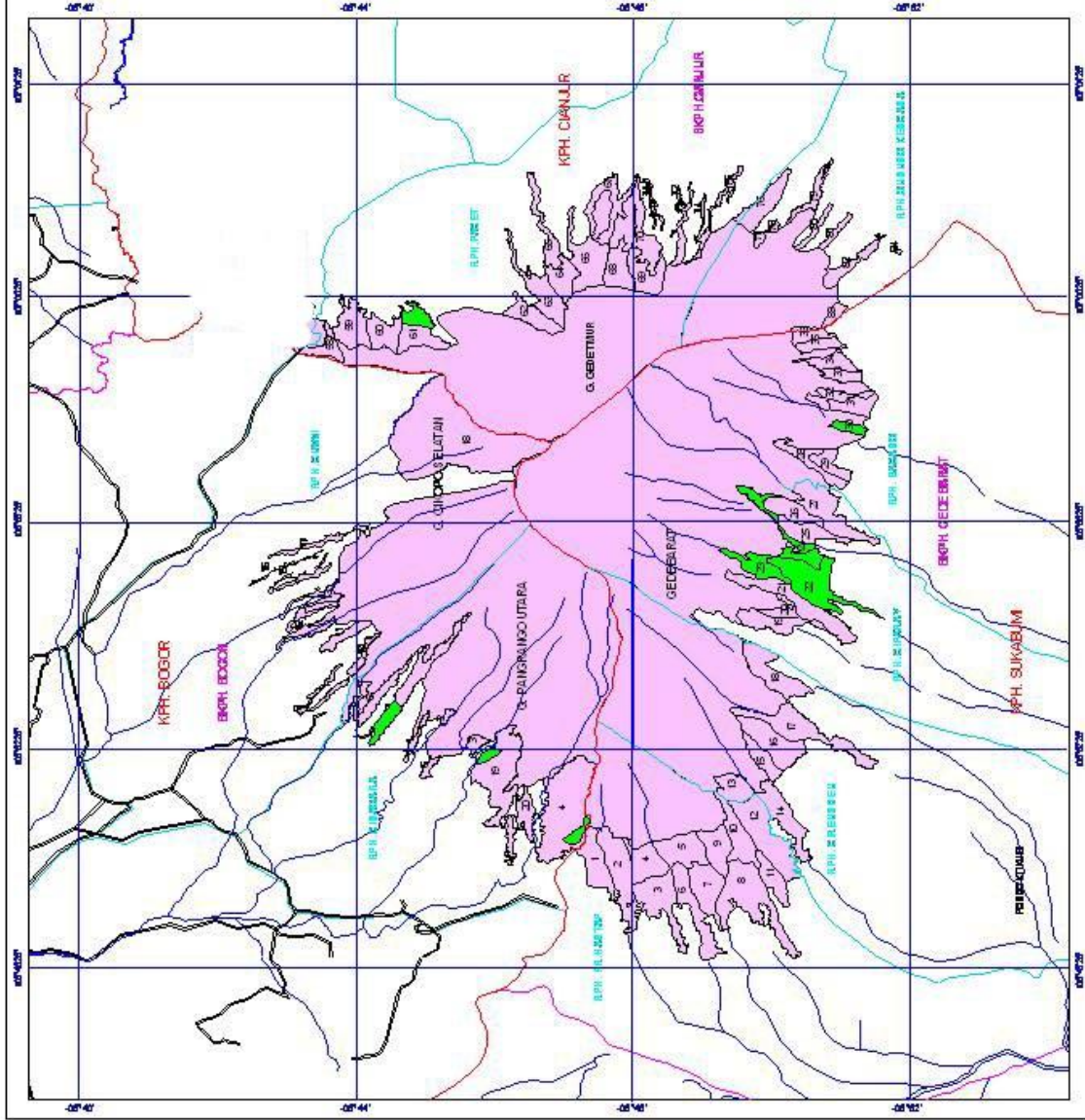
MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
6. Gubernur Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat;
8. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.



PETA
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN PERHUTAN
KELAMPOK HUTAN GIN GEDE PANGRANGO
MENJURU

TAMAN NASIONAL GIN GEDE PANGRANGO
KABUPATEN BOGOR, SUKABUMI DAN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

Luas = 22.851 HA

SKALA 1: 100.000



Luas Kabupaten:

Kab Cianjur : 4.650,58 ha

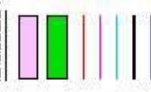
Kab Sukabumi : 10.398,03 ha

Kab Bogor : 8.044,76 ha

KEMENTERIAN

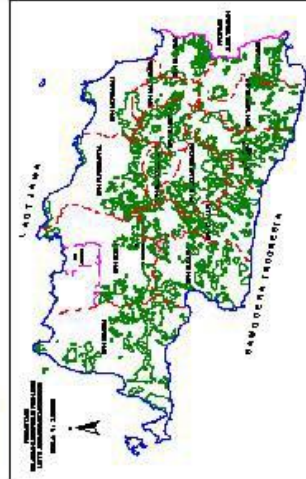
MS. KABAN

KETERANGAN :



DAFTAR PUSTAKA :

1. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000
2. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000
3. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000
4. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000
5. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000
6. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000
7. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000
8. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000
9. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000
10. Hasil Pengukuran Skala 1 : 25.000



BERITA ACARA
HASIL KONSULTASI PUBLIK REVIEW RENCANA PENGELOLAAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
TAHUN 2018

Nomor : BA. 371 /BBTNGGP/Bidtek/Tek.P3/12/2018

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Palace Hotel telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Review Rencana pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango periode 1995 - 2020 yang dihadiri :

1. Para Narasumber
 - Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat
 - Direktorat Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Unsur perwakilan Pemerintahan Propinsi :
 - Kepala Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Barat
 - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Unsur perwakilan Pemerintahan Kabupaten Cianjur :
 - Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur
 - Camat Cipanas
 - Kapolsek Pacet
 - Kapolsek Caringin
 - Kepala Desa Cimaean
 - Kepala Desa Kebon Peuteuy
4. Unsur Perwakilan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi:
 - Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi
 - Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Sukabumi
 - Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi
 - Camat Sukabumi
 - Danramil Sukabumi

- Kapolsek Sukabumi
 - Kepala Desa Cihanyawar
 - Kepala Desa Perbawati
5. Unsur perwakilan Pemerintahan Kabupaten Bogor:
- Kepala Bappeda Kabupaten Bogor
 - Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Bogor
 - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor
 - Muspika Caringin
 - Danramil Pacet
 - Danramil Ciawi
 - Kepala Desa Cileungsi
 - Kepala Desa Wates Jaya
6. Direktur MNC Land
7. Universitas Suryakencana Cianjur
8. Universitas Nusa Bangsa Bogor
9. Sekber Volunteer BBTNGGP

Dengan mempertimbangkan :

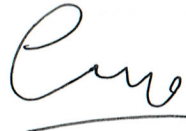
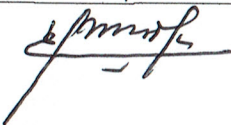
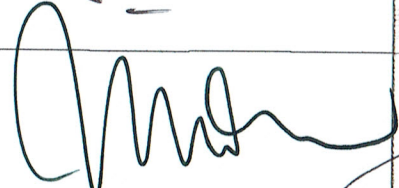
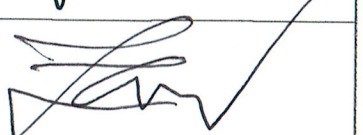
1. Sambutan Kepala Balai Besar TNGGP
2. Paparan Review RPTN Gunung Gede Pangrango
3. Pembahasan oleh Para Narasumber, dan
4. Diskusi

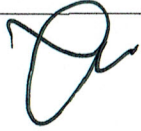
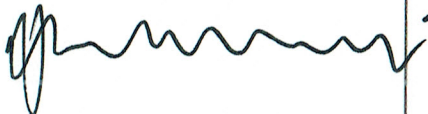
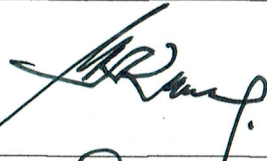
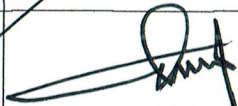
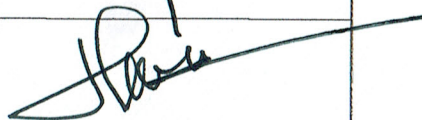
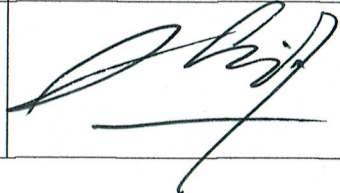
Maka peserta rapat sepakat bahwa:

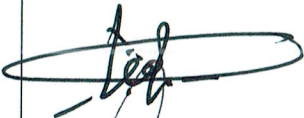
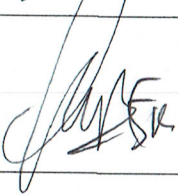
1. Draf Dokumen Review Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah mendapat masukan semua peserta konsultasi publik, sebagaimana tercantum lampiran berita acara ini;
2. Dokumen Review Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Cianjur, Sukabumi, Bogor) serta Rencana Pengembangan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat;
3. Hasil konsultasi publik ini menjadi bahan penilaian di tingkat Pusat, yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Demikian Berita Acara Ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan pengesahan penetapan dan ditandatangani masing-masing perwakilan dari peserta sebagai berikut :

Perwakilan Peserta Konsultasi Publik

No	Nama	Asal Instansi	Tanda tangan
1	Ir. Titu Nasutwati, MA	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat	
2	Fifin Arfana Jogasara, S.Hut., M.Si	Direkoiat Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	Cecep Sumarna, S.Hut	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	
4	Jalaludin Mukti, ST., M.Si	Bappeda Kabupaten Sukabumi	
5	Munajat	Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur	
6	Zan Hady Melan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor	

7	Iwan Setiawan	Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi	
8	Mumuh M Rozi, S.H., M.H.	Universitas Surya Kencana Cianjur	
9	Bambang Supriono, S.Hut., M.Si.	Universitas Nusa Bangsa Bogor	
10	NR Subarna	Polsek Sukabumi	
11	Marwoto	Unsur Muspika Caringin	
12	P. Supriyanto	Koramil Sukabumi	
13	Dodi Rahmat, S.Pd	Desa Cihanjavar	
14	Husen	Desa Perbawati	

15	Iman Rusmandar, S.Hut	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Sukabumi	
16	Zul Isnaendi, ST	Volunteer Montana	
17	Ligar Sonagar R	Volunteer Panthera	

**NOTULEN KONSULTASI PUBLIK
REVIEW RENCANA PENGELOLAAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO (RPTN)
TAHUN 2018**

No	Nama	Usul/ pertanyaan	Tanggapan
1	Igor (Panthera)	1 SDM TNGGP kurang, mohon dioptimalkan dan peningkatan kapasitas personil dari mitra volunteer	Ada di rencana aksi dan akan disempurnakan
		2 Bagaimana cara menciptakan pengunjung cerdas dan pintar? Penyadartauan pada pengunjung	Pengembangan sarpras akan mempertimbangkan lingkungan
		3 TNGGP dapat mengoptimalkan ODTWA yang ada, tidak ada pembangunan yang dapat mengganggu perilaku satwa	
2	Bambang Supriono (UNB)	1 SWOT banyak kelemahan namun sebetulnya dapat mejadi kekuatan seperti IAS dapat menjadi kegiatan pemberdayaan	IAS harus dikeluarkan, jika dibudidayakan di luar yang bertasan dikhawatirkan masuk kembali
		2 Illegal pendakian kerjasama multipihak	
3	Munajat (Dispar cianjur)	1 Apakah pihak pemda telah masuk dalam analisis SWOT ? peran masing-masing pihak	Ada di rencana aksi, pengembangan bersama masyarakat
4	Husen (Desa Perbawati)	1 Pertemuan dengan TNGGP, bagaimana TNGGP mensejahterakan masyarakat penyangga ? Cacing Sonari mohon ditindaklanjuti	Cacing Sonari masih sangat minim informasi, dan akan ditindaklanjuti
5	Jalaludin (Bappeda Sukabumi)	1 Revisi RTRW Sukabumi, apa TNGGP ada perubahan deliniasi ?	Tidak ada perubahan kawasan
		2 Keberlanjutan Cagar Biosfir Cibodas?	Akan pertemuan lebih lanjut

				tentang CBC
		3	Potensi wisata di bagian Utara, pemda harus siap dengan perkembangan yang terjadi	
		4	Telah mapping kecenderungan potensi desa, harapannya ada kemitraan dengan TNGGP	Mohon informasi jumlah desa di Sukabumi apabila ada perubahan, dan dapat mengoptimalkan yang sudah ada
		5	LMDH kolaborasinya seperti apa? Arahnya?	
6	Mumuh (UNSUR)	1	Gangguan kawasan perlu disikapi sejauh mana	Pengelolaan berpijak pada peraturan yang berlaku
		2	Kelemahan di SWOT apa ke TNGGP atau ke manusianya?	
7	Zul (Montana)	1	Wisata sadar lingkungan dengan cara safety talk, dan dipertegas regulasi?	Lebih meningkatkan peran volunteer dan disempurnakan di rencana aksi, penyempurnaan SOP
			Desa Nyalindung ada produksi sayuran kering harapannya dapat dipromosikan oleh TNGGP	
8	Iwan Setiawan (Dispar Sukabumi)	1	Masukan dokumen tersebut menjadi dokumen public	
		2	Daharapkan konsisten dengan dokumen tersebut dan kongkrit	
		3	Zona pemanfaatan terutama pariwisata ada sinergitas dengan pariwisata di daerah	
9	Iman (CDK Sukabumi)	1	Leuweung Weuteuh, taneuh maneuh	Terima kasih masukannya

			sungapan bijilna cai ulah euweuh hayu urang pikadeudeuh	dan semangatnya
10	Hadi (CDK Bogor)	1	Visi sudah tepat, masyarakat telah terlibat	
		2	Sarpras dilengkapi, fasilitas ibadah dan jadwalnya	
		3	Sampah, pelarangan bawa botol plastik	
		4	Pemprov DKI dapat dilibatkan	
		5	Zona Rehabilitasi kapan selesai dimasukkan ke dokumen RPTN	Hampir semua kawasan perluasan, dan kedepan akan dikelola secara bertahap, menunggu regulasi yang memungkinkan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 Sdl Tlp/Fax (0263) 512776/519415
e-mail : info@gedepangrango.org website : www.gedepangrango.org
CIPANAS CIANJUR 43253

Januari 2019

Nomor : S.04 /BBTNGGP/BIDTEK/Tek.P3/01/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Rekomendasi BAPPEDA Prov. Jawa Barat

Yth.
Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
di
Bandung

Berkenaan dengan telah selesainya penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Gede Pangrango Tahun 2019-2028, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. RPTN ini merupakan hasil rivieu RPTN yang telah ditetapkan sebelumnya untuk periode 1995 – 2020 mengingat RPTN tersebut masih mengacu ke luas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) seluas 15.196 ha sedangkan saat ini luas TNGGP adalah 24.270,80 ha.
2. Pada tanggal 27 Desember 2018, draft RPTN Tahun 2019-2028 telah dilakukan konsultasi publik di Hotel Palace Cipanas dengan copy Berita Acara Hasil Konsultasi Publik terlampir.
3. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru, Rencana Pengelolaan untuk taman nasional yang berada di lintas kabupaten perlu mendapat rekomendasi BAPPEDA Provinsi bahwa RPTN Gunung Gede Pangrango telah mempertimbangkan rencana pengembangan wilayah.
4. Oleh karena itu, kami mohon kiranya rekomendasi Bapak sebagaimana dimaksud pada butir 3 terhadap draft RPTN Gunung Gede Pangrango terlampir.

An. Kepala Balai Besar,
Kepala Bagian Tata Usaha



Wasja, S.H.
NIP. 196501061998031004

Tembusan:
Kepala Balai Besar TNGGP (sebagai laporan);



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Jl. Raya Cibodas PO BOX 3 Sdl Cipanas – Cianjur 43253 Tlp/ Fax : 0263-512776

Nomor : S. 237/BBTNGGP/Bidtek/Tek.P3/02/2019
Lampiran : -
Hal : Usulan Penilaian RPTN Balai Besar TNGGP

/4 februari 2019

Kepada Yth.

Direktur Konservasi Kawasan

di

Jakarta

Dalam rangka efektifitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. TNGGP sudah memiliki Rencana Pengelolaan (RP) periode 1995-2020, namun RP tersebut masih berdasarkan luas TNGGP awal ditetapkan yaitu 15.196 ha dan belum berdasarkan luas TNGGP terakhir ditetapkan yaitu seluas 24.270.80 ha.
2. Pada tahun 2018, kami telah melaksanakan review RPTN sebagaimana dimaksud pada butir 1 untuk periode 2019-2028, dan telah dikonsultasikan dengan para pihak terkait serta telah mendapat rekomendasi dari BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
3. Oleh karena hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan draft Rencana Pengelolaan TNGGP periode 2019-2028 untuk dilakukan penilaian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu, kami sampaikan terima kasih

KEPALA BALAI BESAR,



Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si
NIP. 19691016 199403 1 001

Lampiran 7. Estimasi Kebutuhan Anggaran RPJB TNGGP 2019- 2028

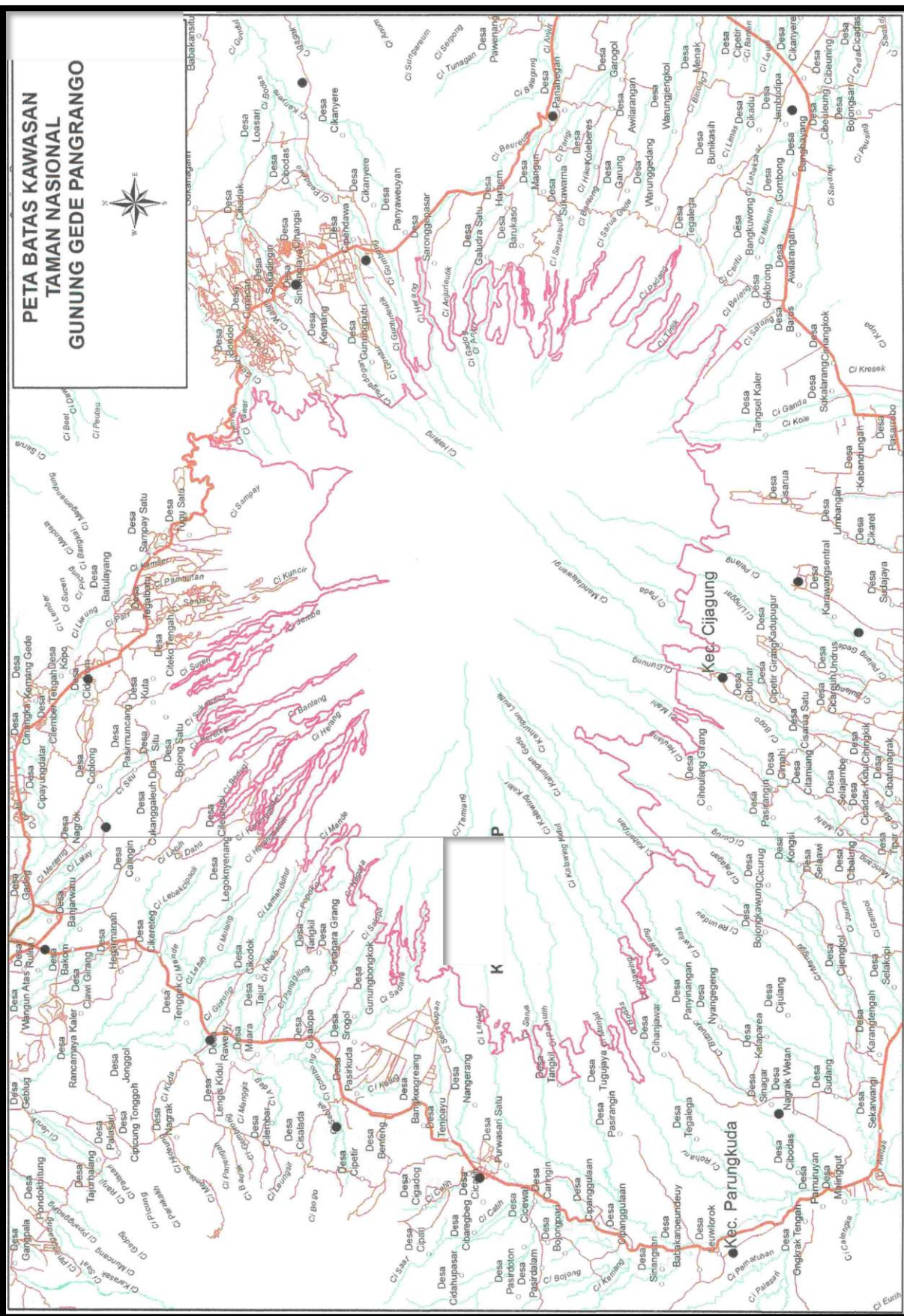
[illegible]

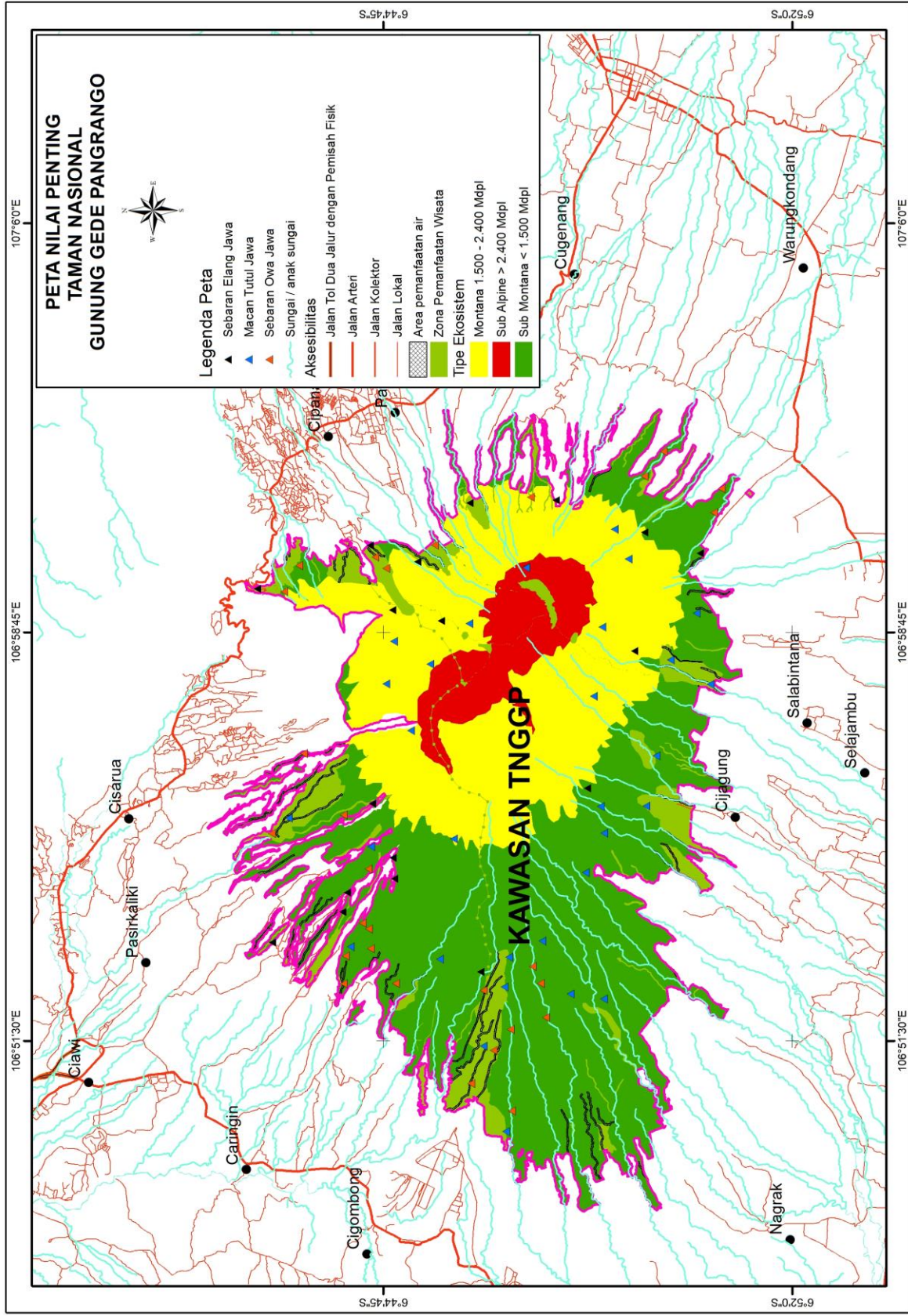
[illegible]

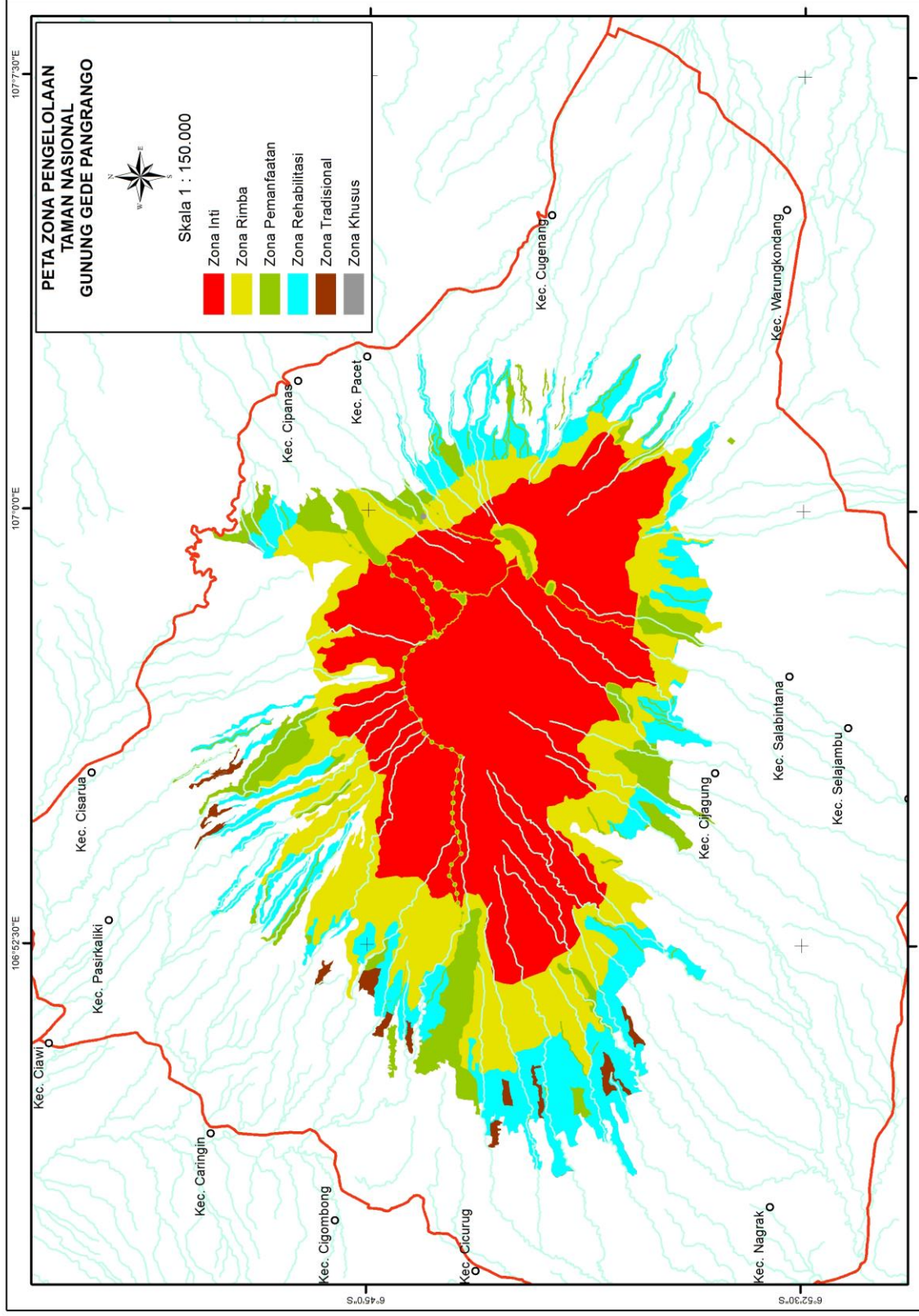
5	1. Penyuluhan	Masyarakat di 65 Desa Penyangga memiliki kesadartahuan tentang arti penting TNGGP	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	APBN	1.500
	2. Peningkatan kapasitas masyarakat	36 Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan BBTNGGP memiliki keterampilan usaha alternatif ekonomi lainnya		150			150			150		150	APBN	600
	3. Membentuk Kader Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	Terbentuknya Penyuluh Kehutanan Sawadaya Masyarakat sebanyak 12 orang			50			50			75		APBN	175
6	Pengembangan daerah penyangga dengan materi kehati TNGGP	Terbentuknya Desa Hoya dan Desa Canar (anggur Bogor)	360	360	360								APBN	1.080
7	Monitoring populasi macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa	Tersedianya data populasi macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa di 10 site monitoring	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	APBN/ CSR/ PKS	2.400
8	Monitoring habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa	Tersedianya data habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa di 10 site monitoring	120	240	240	240	240	240	240	240	240	240	APBN/ CSR/ PKS	2.280
9	Monitoring kecukupan satwa mangsa macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa	Tersedianya data kecukupan satwa mangsa macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa di 10 site monitoring	120	240	240	240	240	240	240	240	240	240	APBN	2.280
10	Pembinaan habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa	Terlaksananya pembinaan habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa Di 10 site monitoring		120	120	120	120	120	120	120	120	120	APBN/ CSR/ PKS	1.080.
11	Membangun dan mengelola sanctuary Elang Jawa	Terbangunnya 1 unit sanctuary Elang Jawa		6.000									APBN	6.000
	Mengelola 1 unit sanctuary Owa Jawa	Meningkatnya pengelolaan 1 unit sanctuary Owa Jawa	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	APBN/ CSR/ PKS	3.000

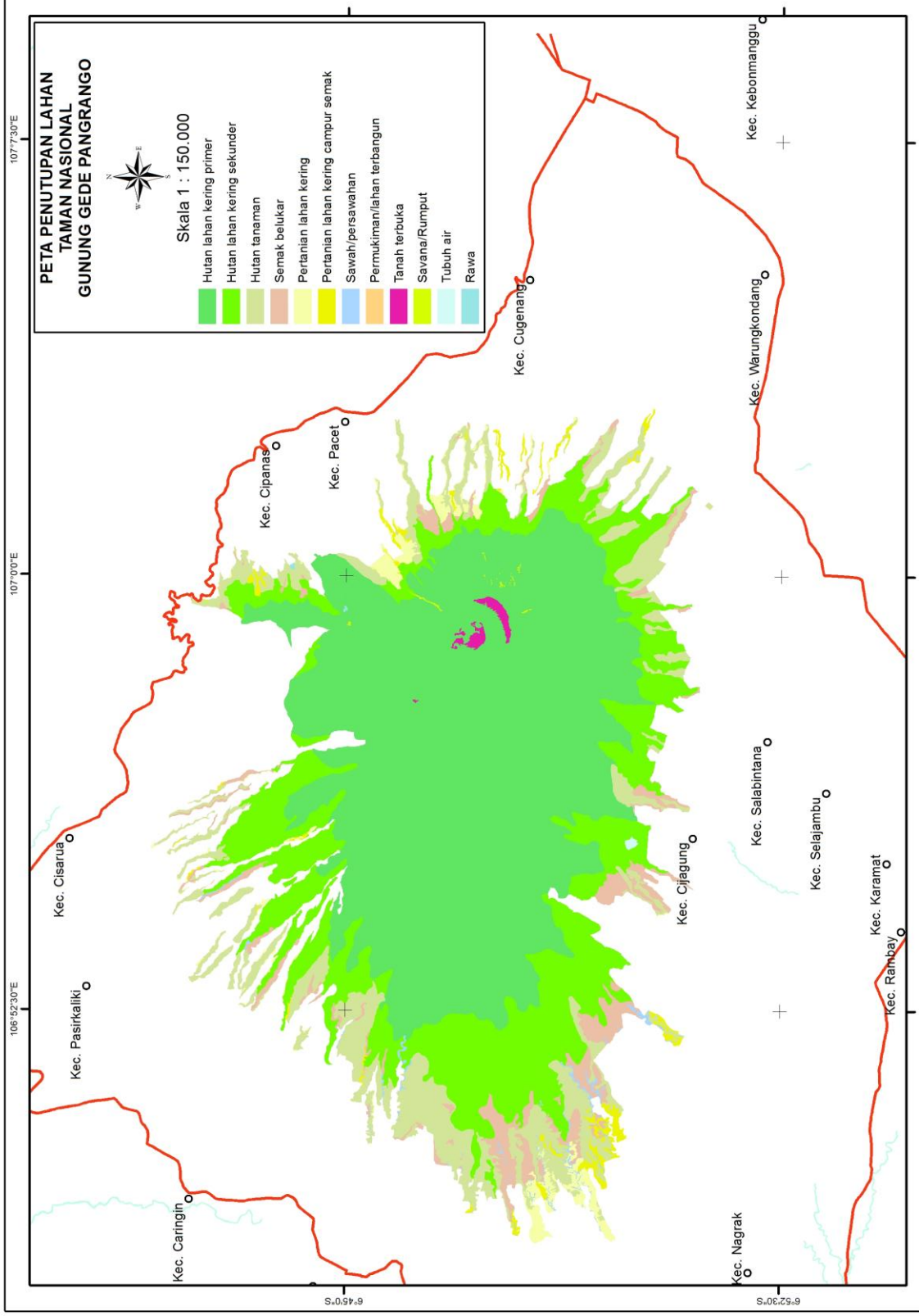
[illegible]

[illegible]









PETA RAWAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO



- Legenda**
- Persepsi Peta Batas
 - Garis Kumbar
 - Sungai
 - Rawan**
 - Bahaya Kebakaran
 - Bahaya Gempa Bumi
 - Perburuan Liar
 - Perburuan Rotan
 - Perburuan Kulit Kayu
 - Perburuan Logam
 - Batas**
 - Batas TNBP
 - Batas PTPN
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Lokal
 - Jalan Aspal
 - Jalan Keras
 - Jalan Lini

Peta ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu data primer maupun data sekunder. Peta ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang berkecimpung di bidang pariwisata, penelitian, dan pengelolaan kawasan konservasi.

